



PKS



Dr. Salim

**TITIK TEMU
&
KOLABORASI
KEBANGSAAN**



Dr. Salim



TITIK TEMU & KOLABORASI KEBANGSAAN

TITIK TEMU & KOLABORASI KEBANGSAAN

Penulis :

Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA

iv, 152 hlm., ukuran buku 13 x 19 cm

Penerbit :



Alamat:

KIOS TAMAN PONDOK LABU

Jl. RS. Fatmawati No. 72 Kios Lantai I Blok A No. 3B Pondok Labu - Jakarta Selatan Telp. (021) 2765 0406

Email : idea.karyapratama@gmail.com

Cetakan Pertama : Juli 2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 22:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KATA PENGANTAR

Apa yang mengikat kita sebagai satu bangsa? Kesamaan sejarah, kesamaan nasib, kesamaan latar suku dan budaya, atau apa? Mengapa kita bersatu padahal ada seribu satu alasan kita untuk bercerai berai?

Menurut saya, yang mengikat kita adalah kehendak untuk menerima perbedaan dan terus mengupayakan titik temu kebangsaan. Semangat itulah yang bisa kita jadikan alasan agar bangsa ini tetap utuh di tengah kebhinekaannya.

Bukan masalah dengan kebhinekaan. Kita terima ia sebagai anugerah dan kekayaan bangsa. Fokus kita hari ini adalah mengupayakan terus persatuannya. Bukan hanya bersatu karena ada ancaman dan musuh bersama tapi bersatu karena kita ingin maju, sejahtera, adil dan makmur.

Banyak potensi dan peluang yang kita miliki tapi belum mampu kita kelola untuk kemajuan bangsa. Padahal Indonesia kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber

daya manusia. Salah satu hambatan kita adalah kurangnya kerja sama dan kolaborasi.

Oleh karena itu dalam banyak kesempatan bertemu dengan tokoh lintas budaya, suku, agama, profesi, partai dan golongan saya sering tawarkan pendekatan kolaborasi ini. Perbedaan pendapat, pandangan dan sikap itu hal lumrah tapi bukan halangan untuk berkolaborasi. Karena kita meyakini tujuan kita semua sama untuk menjaga NKRI dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Untuk berkolaborasi kita harus membuka diri dan bersedia memberi dan menerima atau bertukar pikiran dan tenaga untuk kemajuan bangsa. Tidak ada eksklusivitas apalagi merasa paling Indonesia, paling NKRI, atau paling merah putih. Tidak pula merasa inferior sebagai bagian dari bangsa Indonesia karena kita punya peran kebangsaan yang sama dalam menjaga dan memajukan NKRI.

Dalam konteks itu PKS harus menjadi teladan. Maka kepada struktur dan kader PKS saya tegaskan bahwa PKS harus menjadi partai milik seluruh rakyat Indonesia apapun latar suku, agama, dan golongannya. Ambil hati rakyat dengan pelayanan terbaik. Mengambil hati jauh lebih utama daripada menang sendiri.

Cintai seluruh penduduk negeri ini apapun sukunya, apapun agamanya, apapun partai dan golongannya. Cari titik temu, bangun kolaborasi. Saya yakin kalau kita mencintai seluruh penduduk negeri ini tidak lama lagi kita akan bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, MA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Indonesia Bangsa Besar dan Berbhinneka.....	1
Indonesia Milik Kita Semua.....	3
Menjadikan Pancasila Ideologi Pemersatu.....	5
Pancasila Sebagai Karakter Bangsa	9
Mencari Kalimatun Sawa'	13
Memajukan Budaya Bangsa	19
Kolaborasi Melayani Indonesia.....	23
Mengokohkan Nasionalisme Relijius	29
Peran dan Tanggung Jawab Umat Islam dalam Menjaga Keindonesiaan.....	33
Watak Demokrasi Indonesia	37
Otokritik Demokrasi Kita.....	43
Paradigma Negara Pelayanan	49
Menegakkan Hukum dan Keadilan	53
Nasihat Bagi Pemimpin.....	57

Berpolitik untuk Membangun Bangsa dan Peradaban.....	61
Nasihat Bagi Para Pejuang Politik	67
Proklamasi Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Kita Hari Ini.....	71
Kita Telah Merdeka Tapi Tidak (Pernah) Berhenti Berjuang.....	79
Bagaimana Kita Menghargai Para Pahlawan?.....	85
Bagaimana Kita Menghormati Para Ulama?.....	91
Jas Hijau : Menyambung Mata Rantai Sejarah Perjuangan Ulama.....	97
M. Natsir, Mata Air Keteladanan dalam Menjaga Integrasi Nasional.....	101
Semangat Berkurban Untuk Bangsa	105
Pilar-Pilar Peradaban Bangsa.....	109
Ketahanan Keluarga Pilar Ketahanan Nasional.....	113
Mencetak Generasi Masa Depan yang Berkarakter dan Berkemajuan.....	117
Membangun Peran Kebangsaan Perempuan	127
Pelajaran Penting Pandemi Covid 19 Bagi Dunia.....	133
Pelajaran Penting Pandemi Covid 19 Bagi Indonesia	137
Mengembalikan Kejayaan Laut Nusantara.....	143
Membangun Kedaulatan Pangan	147
Profil Penulis.....	151



INDONESIA BANGSA BESAR DAN BERBHINNEKA

Indonesia ini bangsa yang besar dalam segala aspeknya. Bangsa besar ini memiliki kemajemukan yang luar biasa. Majemuk sukunya, majemuk budayanya, majemuk agamanya, majemuk bahasanya, banyak golongannya, dll. Jumlah pulau 17.504 pulau, 270 juta penduduk, 1.128 suku bangsa, 546 bahasa daerah, 6 agama yang diakui dan puluhan aliran kepercayaan, Dengan kondisi demikian, kemampuan dalam mengelola kemajemukan adalah kunci. Konon salah satu sebab bangsa ini dijajah sampai ratusan tahun karena ketidakmampuan kita dalam mengelola kemajemukan pada masa itu.

Tidak mudah menyatukan bangsa Indonesia. Dulunya negeri ini terdiri dari berbagai wilayah dengan ikatan kedaerahan atau primordialitas yang kuat. Maka penjajah sampai akhir usaha mereka selalu menginginkan Indonesia terpecah-pecah dalam wilayah, kesukuan, dan

kedaerahan. Ketika akhirnya Indonesia merdeka, hal itu tak lain dan tak bukan karena para pejuang dan pendiri bangsa ini mampu menghadirkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Itulah modalitas kebangsaan yang mestinya kita warisi hingga sekarang. Untuk mewujudkan modalitas itu tentu tidak mudah. Persatuan dan kesatuan hanya akan terwujud jika sebagai bangsa kita merasakan senasib sepenanggungan, saling percaya, satu visi dan satu tujuan. Ia juga bisa terwujud jika bangsa ini merasakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

Begitulah cara kita mengukur dan mengevaluasi kondisi kebangsaan yang kita hadapi. Tentu kita semua tidak ingin bangsa kita jatuh kembali dalam keterpurukan seperti zaman penjajahan karena hilangnya persatuan dan kesatuan. Kita ingin bangsa ini maju, berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera.

Sekarangsaatnya bagikita untuk mengisi kemerdekaan dengan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Kita satukan pemikiran, gagasan, tenaga, dan karya untuk Indonesia yang kita banggakan. Seluruh ikhtiar anak bangsa yang ingin memajukan bangsa ini harus kita dukung penuh. ■



INDONESIA MILIK KITA SEMUA

Indonesia ini milik kita semua. Titik temu kebangsaan kita bernama Pancasila yang diterjemahkan dalam Konstitusi UUD 1945. Kita boleh berbeda suku, ras, agama, dan antargolongan, tapi kita hidup sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air: Indonesia. Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) di bumi Allah bernama Indonesia.

Perbedaan adalah sunnatulloh, bahkan satu diantara anugerah Allah Swt. Allah berfirman dalam Al-Qur'an "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal...*(Al-Hujurat: 13).

Bukan perbedaan-nya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka adalah kekayaan kita, Tunggal Ika adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia.

Bangsa ini bangsa besar dalam seluruh aspeknya: wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI. Sikap yang demikian hanya akan memecah-belah, mensegregasi, menimbulkan disharmoni dan akhirnya disintegrasi bangsa.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian. Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan status atau strata sosial ekonomi. Inilah yang kita sebut persatuan Indonesia. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan contoh bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan persatuan dan bukan dengan perpecahan.

Mari kita hentikan sikap permusuhan, memecah-belah, menyebarkan fitnah, hoax dan kebencian (*hate speech*) di antara sesama anak bangsa. Sikap tersebut bukan saja tidak berfaedah, tapi lambat laun menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran dan negara gagal (*failed state*). Sikap tersebut juga sangat jelas dilarang agama dan dibenci Allah Swt. Mari kita kembali pada jati diri bangsa kita yang ramah, sopan santun, tenggang rasa, tepo seliro, dan gotong royong.

Hidup bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, Indonesia milik kita semua. Merdeka. Allahu Akbar!! ■



MENJADIKAN PANCASILA IDEOLOGI PEMERSATU

Pancasila adalah falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai falsafah dan dasar negara, sila-sila Pancasila berperan menyatukan bangsa Indonesia. Sebaliknya, setiap narasi yang berpotensi memecah belah pasti bertentangan dengan Pancasila, sebut saja narasi paling Indonesia atau paling Pancasila dengan latar pemikiran eksklusivitas. Narasi tersebut tentu tidak tepat dan bisa kontraproduktif. Narasi tersebut tidak produktif karena bersifat agresif, represif, dan segregatif terhadap kelompok masyarakat lainnya yang distigmatisasi anti-NKRI atau anti-Pancasila. Secara filosofis narasi tersebut juga salah karena kita semua sejatinya sedang berproses menjadi Indonesia (*being Indonesia*) maka tidak selayaknya mengklaim “paling Indonesia” atau “paling Pancasila” sambil menunjuk—secara sadar atau tidak—pihak-pihak lain anti-NKRI atau anti-Pancasila.

Kita memerlukan pendekatan yang asertif, persuasif, dan dialog untuk menghasilkan kesepakatan (konsensus kebangsaan). Bukankah itu yang diajarkan dan selalu diingatkan para pendiri bangsa? Bung Karno, misalnya, tegas mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu, yang semestinya kita pahami agar Pancasila tidak dijadikan alat untuk mensegregasi masyarakat: saya Pancasila dan anda bukan. Saya Pancasila dan anda anti-Pancasila.

Oleh karena itu, hendaknya setiap warga bangsa arif dalam menggunakan Pancasila sebagai “jargon”, jangan sampai menimbulkan kesan segregasi atau alienasi di masyarakat. Klaim pancasilais atau NKRI tidak perlu dilakukan, apalagi ditunjukkan secara demonstratif karena akan menimbulkan reaksi sebaliknya. Apalagi jika hal itu dibumbui pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang, ujaran kebencian, dan klaim kebenaran di media sosial.

Mari kita jadikan Pancasila sebagai platform bersama (*common platform*) yang bersifat terbuka sehingga setiap orang merasa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kaum beragama, organisasi keagamaan, dai dan pengikutnya, merasa nyaman dalam beragama dan menyebarkan nilai-nilai agama karena memang sejalan dengan sila Pertama Pancasila. Pejuang keadilan merasa memiliki dasar kuat untuk bersikap kritis dalam menuntut keadilan karena memang itulah nilai utama Sila Kedua dan Kelima, dan seterusnya.

Pancasila harus jadi jembatan, bukan tembok pemisah. Pancasila merekatkan, bukan membelah. Tidak boleh ada yang disudutkan atas nama Pancasila, sementara yang lain merasa paling Pancasila. Dengan cara pandang tersebut,

kita akan menyediakan hati dan pikiran yang lapang bagi setiap perbedaan persepsi, aspirasi, aktualisasi kebangsaan di bumi Indonesia ini. Satu sikap mental yang menjadikan kita terbuka, merangkul, bekerja sama, dan bersinergi.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian atau beberapa kelompok saja. Bangsa ini harus dikelola secara bersama-sama oleh segenap rakyatnya dari latar belakang apapun dia berasal. Tugas sejarah kita adalah membangun sinergi dan kolaborasi seluas-luasnya untuk Indonesia, bukan melakukan segregasi dan polarisasi. ■



PANCASILA SEBAGAI KARAKTER BANGSA

Bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini? Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka. Diterima sebagai kesepakatan bersama (*kalimatun sawa'*, *common denominator*) oleh semua kelompok dan golongan di tubuh bangsa ini. Inilah kulminasi budaya luhur bangsa Indonesia yang digali bersama oleh tokoh-tokoh bangsa sehingga mencerminkan kualitas manusia Indonesia.

Jika ada pertanyaan apa karakter khas bangsa Indonesia? Jawabnya adalah Pancasila. Pancasila memberikan warna (corak) identitas/karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar (*ground norm*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*philosophische grondslag*). Konsekuensinya, Pancasila selain menjadi identitas/karakter juga menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam bernegara.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini kemampuan Pancasila sebagai “*bintang pimpinan*” (*leitstar*). Kata Bung Karno, Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama.

Lima sila dalam Pancasila diambil/disusun/disarikan dari nilai-nilai luhur yang ada dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Apa nilai-nilai identitas itu:

Pertama, Indonesia adalah bangsa yang religious (*religious state*). Apapun agamanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara dan bangsa yang beragama.

Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal, yang menghormati hak-hak kemanusiaan yang beradab.

Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut terdapat tenunan dan jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbeda. Ada elemen-elemen lokal,

tetapi selalu ada benang merah yang menyatukan kita. Seperti itulah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika.

Keempat, di seluruh Nusantara, bangsa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia.

Empat unsur tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan cita-cita dan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, di manapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, atau lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil makmur, tentram raharja.

Pancasila dilahirkan dari pergulatan pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa dan perjuangan kemerdekaan. Perdebatan konseptual rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan tiga hal:

Pertama, Pancasila menunjukkan kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa kita. Bangsa dengan kebhinekaan yang besar harus dibangun dengan konsepsi yang kuat untuk menjaga kebesarannya. Tanpa konsepsi itu bangsa kita sudah lama tercerai berai dalam kesukuan dan kedaerahan.

Kedua, Pancasila menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakternya yang unggul. Pun demikian, Pancasila sejatinya bukan saja milik bangsa Indonesia, tapi bisa diwariskan untuk dunia sebagaimana Pidato Bung Karno yang mengguncang dunia di Sidang Umum PBB 30 September 1960 tentang Pancasila (*To Build The World a New*)

Ketiga, dan ini yang sangat penting, rumusan Pancasila menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati tokoh bangsa untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.

Dengan refleksi atas lahirnya Pancasila tersebut, apa sikap sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini?

Pertama, Pancasila telah final sebagai falsafah dan norma dasar beregara (dasar negara). Tugas kita mengokohkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, menjadikan Pancasila milik bersama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang terbuka. Seluruh warga negara aman dan nyaman mengekspresikan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, menjadikan Pancasila alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah, segregasi, dan alienasi warga negara.

Keempat, mengedepankan sikap toleransi (*tasammuh*), silaturahmi, kerjasama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian, dan yang demikian tidak lah mungkin bisa dilakukan.

Kita meyakini jika Pancasila dipedomani sebagai dasar negara, bangsa Indonesia akan hidup dalam rukun dan harmonis serta terwujud cita-cita nasional: masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. ■



MENCARI KALIMATUN SAWA

Dalam kitab suci al-Qur'an, istilah *kalimatun sawa'* bermakna satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan. Dalam konteks keyakinan beragama, kalimat yang sama itu adalah *"tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah."* (QS Ali Imran: 64).

Ulama modern asal Aceh, Hasbi as-Shiddiqy menggunakan istilah *kalimatun sawa'* sebagai konsep kesepakatan di tengah perbedaan keyakinan, tidak hanya menyangkut masalah keagamaan, namun juga masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, tapi memiliki komitmen bersama.

Komitmen itu telah dibangun sejak Sumpah Pemuda 1928 dengan inisiator tokoh-tokoh organisasi kepemudaan

dari berbagai daerah Nusantara, yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain.

Kesepakatan dasar tentang Tanah Air, Bangsa dan Bahasa yang satu dibahas kembali secara mendalam pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945. Sejumlah tokoh tampil menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang apa dasar negara yang disepakati, jika Indonesia merdeka? Pidato Ir. Soekarno menjadi momentum puncak (lahirnya istilah Pancasila), disamping pidato Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan tokoh lain yang tak tercatat.

Episode itu berlanjut dengan pembahasan resmi dalam sidang marathon yang diakhiri dengan kesimpulan oleh Panitia Sembilan sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Naskah piagam inilah yang direncanakan akan dibacakan dalam momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, kondisi domestik penuh ketidakpastian dan situasi dunia juga berubah dengan cepat, sehingga teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) dirumuskan secara mendadak oleh Soekarno dan Hatta.

Sehari setelah proklamasi (18 Agustus 1945) dilakukan sidang lanjutan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menyepakati Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan resmi tentang dasar negara Republik Indonesia: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan resmi itu dikenal sebagai Pancasila.

Terlihat jelas, dari proses sejarah yang panjang bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang disepakati oleh para Pendiri Bangsa Indonesia sebagai refleksi dari kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur bahwa titik temu dan kesepakatan historik itu dicapai melalui jalan dialog dan musyawarah, bukan dipaksakan oleh satu pihak dengan kekerasan atau dicangkokkan oleh kekuatan asing yang ingin bercokol di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah menunjukkan kualitas luhur dengan mencapai *kalimatun sawa'* dalam konteks nasionalisme modern. Bagimanakah kita mencapai titik temu di masa kini?

Konteks sejarah kini bangsa Indonesia menghadapi polarisasi politik sebagai dampak dari penyelenggaraan demokrasi yang belum sempurna. Sejak pemilihan umum 2014 dan berlanjut pemilu 2019, pembelahan politik itu merasuk hingga ke kelompok masyarakat akar rumput. Cukup mengkhawatirkan karena bisa menuju disintegrasi bangsa, bila tidak segera ditangani dengan serius.

Sebenarnya di tingkat elit politik telah terjadi semacam rekonsiliasi dan kompromi, namun ada saja kelompok yang tidak puas lalu mengeksploitasi perbedaan kepentingan menjadi pembelahan sikap politik. Kondisi itu diperparah dengan percakapan publik yang berlangsung liar di media sosial melibatkan para buzzer dan provokator. Terbangun persepsi kelompok yang semakin mengeras dan terjadi jurang komunikasi yang semakin lebar.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai entitas politik yang lahir pasca reformasi 1998, menyadari bahaya itu. Untuk itu, PKS terus melakukan silaturahmi kebangsaan dan membangun komunikasi yang lebih intens dengan para

tokoh bangsa dan elit politik negeri ini. PKS menawarkan satu gagasan kebangsaan yang diharapkan bisa menjadi titik temu yaitu kolaborasi melayani Indonesia. Alhamdulillah 'titik temu' itu disambut baik oleh para tokoh dan politisi yang hadir, setidaknya yang terekam dalam momen milad PKS ke-20 di Istora Senayan Jakarta (29/5/2022).

Tokoh yang hadir dan berpidato langsung antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (perlunya mendorong titik tengah), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (tidak ada jalan lain menghadapi tantangan, kecuali berkolaborasi dengan semangat Islam *rahmatan lil alamin*), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, sekaligus Wakil Ketua Partai Gerindra (kemajuan Indonesia hanya bisa dicapai dengan sinergi dan kolaborasi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (urgensi persatuan di atas kemajemukan).

Sementara itu, tokoh yang menyampaikan pandangan secara virtual adalah Jusuf Kalla (posisi sebagai oposisi tidak menghalangi parpol berkontribusi menjaga demokrasi), Ketua Umum Nasdem Surya Paloh (kontestasi politik sebagai keniscayaan dan kolaborasi sebagai tanda kematangan berpolitik), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (dengan ideologi kekaryaan siap bekerjasama memakmurkan Indonesia), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kolaborasi politik untuk memberi solusi bagi persoalan rakyat merupakan imperatif), Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (semangat persatuan untuk kemajuan bangsa) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (keterbukaan dengan semua elemen strategis).

Milad PKS memang bukan kongres pemuda atau sidang BPUPK, bukan pula konvensi nasional untuk

menentukan calon presiden RI tahun 2024. Namun, segenap tokoh yang berpotensi tampil dalam percaturan nasional telah hadir mengungkapkan gagasannya. Disamping itu, pimpinan parpol yang paling berpengaruh telah menyatakan secara terbuka siap bergandeng tangan mencari solusi di tengah gejala polarisasi dan kebuntuan politik. Separuh jawaban sudah terungkap, tinggal komunikasi politik yang lebih intensif untuk mewujudkan koalisi konstruktif.

Sebagaimana pendiri bangsa mencapai kesepakatan tentang dasar negara Pancasila di awal kemerdekaan, maka kita perlu mencari titik temu di tengah situasi transisi saat ini. Jangan sampai kita membongkar dan mengorbankan ikatan kebangsaan yang sudah dirajut generasi perintis.

PKS bersyukur bisa menjadi tuan rumah bagi Silaturahmi Kebangsaan yang dibutuhkan menjelang pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024 nanti. Demokrasi Indonesia harus semakin matang. Kemantapan sistem demokrasi di Indonesia sedang diuji, sekali lagi, melalui pergiliran kekuasaan secara damai.

Kita mengenal prinsip perubahan dan kesinambungan (*change and continuity*). Perubahan diperlukan untuk memberi peluang bagi kemajuan, sebagaimana perubahan merupakan sunnatullah (hukum alam) yang berlaku dalam berbagai lapangan kehidupan. Sementara itu, kesinambungan juga diperlukan agar upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Indonesia (1945) tidak terputus di tengah jalan. Harus ada estafet perjuangan bangsa dari generasi ke generasi, jangan sampai diinterupsi atau terdisrupsi hanya karena pergantian kekuasaan. Mari duduk bersama untuk mencapai *kalimatun sawa'*. ■



MEMAJUKAN BUDAYA BANGSA

Pancasila disebut sebagai kulminasi atau puncak-puncak budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jika kulminasinya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang demikian luhur, apatah budaya bangsa kita begitu luhur sebagai warisan nenek moyang yang pantas kita jaga, rawat, majukan bersama.

Indonesia demikian kaya dengan suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Indonesia juga begitu kaya dengan bahasa, dialek, dan logat. Semuanya punya keunikan dan kekhasan. Hebatnya semua hidup berdampingan secara damai sejak dulu kala tanpa ada keinginan untuk menjadi lebih dominan dibandingkan yang lain.

Satu ciri khas bangsa kita, semua nilai budaya itu mendapat tempat dan penghormatan yang layak dari seluruh rakyat. Semuanya memandang dalam kaca mata positif bahwa setiap nilai budaya memberi warna bagi

keindonesiaan. Bukan hanya memberi warna tapi juga mengokohkan jati diri bangsa Indonesia.

Itulah yang mendasari jaminan konstitusi UUD 1945 terhadap eksistensi kebudayaan bangsa. Pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kalau kita pelajari secara mendalam kebudayaan suku-suku bangsa di setiap wilayah Indonesia sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan bahkan peradaban yang tinggi. Budaya Jawa misalnya berpegang pada nilai seperti keyakinan/keteguhan, pencapaian, kesabaran dan keselarasan, sopan santun/tepo seliro.

Masyarakat Lampung punya lima filosofi yang maknanya sama dengan Pancasila mulai dari kebersihan hati, memuliakan tamu, ikut berjuang dalam menegakkan kebenaran, tolong menolong dalam persatuan, dan pemberian gelar gelar bagi orang yang berprestasi.

Budaya Sunda ditopang oleh nilai silih asih, silih asah, silih asuh, cageur, bageur, bener, singer, dan pinter. Budaya Minang menganut nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain, nilai kesepakatan/musyawarah, nilai ketelitian dan kecermatan, nilai patuh dan taat pada adat serta syara', dll.

Budaya Bugis lain lagi terdapat nilai-nilai yaitu *alempureng* 'kejujuran', *amaccang* 'kecendekiaan', *asitinanjang* 'kepatuhan', *agettengeng* 'keteguhan', *reso* 'usaha', dan *siriq* 'harga diri'. Dan masih banyak lagi nilai budaya luhur tiap suku bangsa di Indonesia.

Budaya Dayak menganut nilai kebersamaan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama, rasa kesetiakawanan, penghargaan terhadap warisan leluhur, dan menjunjung tinggi nilai kerohanian atau keagamaan.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa di atas bukan perkara sederhana dan mudah karena berkelindan dengan deras arus informasi bahkan infiltrasi budaya asing yang bukan saja berbeda tapi juga bertentangan dengan budaya bangsa dan adat istiadat yang berlaku.

Perubahan gaya hidup akibat masuk dan merebaknya paham kebebasan (liberalisme), individualisme, sekularisme, dan lainnya telah menggeser nilai budaya terutama pada generasi muda. Nilai budaya kolektivisme atau kebersamaan/gotong royong, sopan santun, menjunjung nilai agama dan seterusnya sudah banyak terkikis oleh nilai-nilai budaya dominan.

Hal tersebut tentu harus menjadi tanggung jawab bersama bagaimana terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan internalisasi nilai budaya kepada anak-anak dan generasi muda. Caranya harus lebih kreatif dengan berbagai instrumen yang disediakan oleh dan sesuai perkembangan zaman.

Dimulai dari institusi keluarga, komunitas masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, hingga lembaga negara harus bersama-sama melestarikan dan mamajukan budaya bangsa. Pemerintah harus hadir dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang semakin kokoh dalam melindungi dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.

Kita ingin bangsa ini kokoh dalam kepribadian dan karakter yang bersumber dari nilai budaya yang luhur. Kemajuan tidak boleh melunturkan nilai budaya bangsa tapi sebaliknya mengokohkannya karena kita tahu di atas nilai-nilai itulah bangsa Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. ■



KOLABORASI MELAYANI INDONESIA

Setiap elemen bangsa harus memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin sebagian kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia. Tapi seyogiya kita merasa masih jauh lebih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Tanggung jawab kita jauh lebih besar dari waktu yang kita punya.

Menjadi Indonesia adalah proses yang tak bekesudahan, *being Indonesia is never ending process*. Mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-2, bangsa dan negara Indonesia masih terus berproses untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia "...yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur."

Kita semua harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas dan

kualitas sumber daya manusia kita, serta mengokohkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita tersebut.

Dalam konteks perjuangan dan tanggung jawab tersebut, ada satu tema yang penting kita angkat bersama, yaitu “Kolaborasi Melayani Indonesia”. Melalui tema ini kita ingin mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya para pejabat publik dan elit politik, untuk mengokohkan jati diri dan karakter pelayanan kepada rakyat. Tema ini sekaligus menjadi syiar bahwa pelayanan harus menjadi bahasa kepemimpinan negeri ini, dimana para pemimpin, pejabat publik, aparatur negara itu sesungguhnya dan sejatinya adalah “pelayan rakyat.”

Nabi SAW bersabda: *“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”* (HR. Abu Na’im). “Melayani Indonesia” harus menjadi garis perjuangan dan pengabdian bersama di pentas politik dalam level apapun. Bukanlah disebut perjuangan dan pengabdian jika apa yang kita lakukan justru melukai Indonesia, menjatuhkan Indonesia, apalagi sampai menghancurkan Indonesia.

Dengan tema ini pula kita menyadari bahwa untuk melayani Indonesia dibutuhkan kolektivitas atau kebersamaan kita sebagai bangsa. Kolektivitas yang mendasari kita untuk bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong di antara sesama anak bangsa—apapun suku bangsa, agama, daerah dan golongan kita sepanjang gen kita adalah gen Indonesia kita wajib menjaga dan memajukan Indonesia.

Indonesia adalah negara besar dalam seluruh aspek dan potensinya. Dimana potensi kebesaran Indonesia itu belum benar-benar aktual meski pemerintahan silih berganti. Sehingga kita belum juga beranjak atau tinggal landas dari negara berkembang menuju negara maju. Akibatnya, negara kita terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau *middle income trap*.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dan problematika pembangunan yang harus diselesaikan bersama mulai dari persoalan ekonomi: pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan, dan pengangguran; persoalan pemerataan pembangunan; persoalan keadilan ekonomi, politik, dan hukum; persoalan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan; persoalan jaminan sosial dan layanan kesehatan; hingga persoalan infrastruktur dasar bagi warga negara di berbagai wilayah.

Pandemi covid 19, dengan izin Allah dan kebersamaan komponen bangsa dalam mengatasinya, hari ini sudah mulai melandai. Namun kita tidak bisa menutup mata dampak sosial ekonomi dari pandemi covid selama 2 tahun terakhir diprediksi masih akan berkepanjangan. Di samping kerja-kerja untuk terus membangkitkan ekonomi rakyat terutama mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, Indonesia perlu mengantisipasi perubahan *landscape* ekonomi global yang saat ini diambang krisis.

Dunia saat ini sedang menghadapi *triple crisis* yang sangat berat yaitu pertumbuhan ekonomi yang lamban, inflasi yang meningkat, dan tingkat suku bunga yang tinggi. Indonesia harus mengantisipasi hal tersebut dengan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada penguatan fundamental ekonomi nasional.

Kebijakan yang tepat tersebut sudah barang tentu bukan kebijakan yang berpihak pada oligarki politik dan ekonomi karena sudah pasti kecenderungan ini malah semakin membuat ekonomi kita rapuh. Orientasi tersebut juga hanya akan membuat kepemimpinan nasional kita di berbagai level dan sektor menjadi lemah dalam melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, kita bersama-sama masyarakat sipil dan elemen mahasiswa serta masyarakat luas memberikan catatan kritis hingga penolakan terhadap sejumlah produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang dalam penilaian kami lebih berpihak pada oligarki. Selain negativitas yang saya sebutkan di atas, oligarki jelas melemahkan semangat kolektivitas dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa dalam mewujudkan cita-cita bernegara. Orientasi tersebut juga berlawanan dengan semangat kolaborasi dalam melayani Indonesia.

Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dengan kesenjangan atau disparitas sosial ekonomi yang masih cukup tinggi kita harus pandai-pandai mengolah rasa kebangsaan : mengolah rasa keadilan, rasa memiliki, rasa kebersamaan, hingga rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama anak bangsa. Fokus kita hari ini adalah memperjuangkan rasa kebangsaan tersebut.

Realitas bangsa Indonesia yang majemuk atau berbhineka harus kita maknai anugerah Allah SWT. Bukan perbedaan-nya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Bukan perbedaan yang terus kita bicarakan apalagi kita pertentangkan, tapi pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia. Maka, sekali lagi, mengolah rasa itu penting. Tumbuhkan semangat kebersamaan, semangat empati dan kepedulian, serta semangat solidaritas sosial dalam tubuh bangsa ini, insya Allah rasa kebangsaan kita akan semakin kuat sekaligus menjadi modal dasar pembangunan yang berkeadilan. ■



MENGOKOHKAN NASIONALISME RELIJIUS

Kita menyakini Indonesia ini adalah warisan para ulama, habaib, dan santri pejuang yang benar-benar dihadirkan dengan menimbang kemaslahatan umum. Kalau kita kaji secara normatif yuridis isi kandungan Pancasila dan UUD 1945 kita akan temukan betapa para pendiri bangsa ini—yang nota bene sebagian besarnya adalah ulama dan wakil-wakil umat—begitu tepat merumuskan dan benar-benar memahami, tujuan-tujuan (*maqosid syariah*) dalam pendirian negara bangsa yang merdeka.

Alam pikiran mereka nyaris sempurna memberikan arah Indonesia sebagai negara merdeka yang hadirnya harus membawa maslahat bagi rakyatnya sejalan dengan tujuan dihidirkannya syariat agama (*maqosid syariah*). Bahkan, kesan bangsa ini sebagai bangsa beragama dan relijius sangat kuat terasa saat membaca dan memahami dasar dan konstitusi negara. Ada banyak fakta (norma) yuridis yang mendukung pernyataan itu.

Kelima sila Pancasila tidak ada keraguan merupakan manifestasi dari *maqosid syariah* baik dalam cakupan klasik Imam Al-Ghozali dan terlebih dalam cakupan kontemporer. Sila-sila itu, yang dikatakan oleh sejarahwan sebagai puncak-puncak (kulminasi) kebudayaan nasional, faktanya begitu kuat pesan dan kesan penjagaannya terhadap apa-apa yang dipentingkan oleh syariat dalam hidup ini.

Pertama, penjagaan terhadap agama. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk penjagaan terhadap keyakinan agama sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable right*). Hal ini diperkuat dalam Pasal 29 UUD 1945. Melalui sila ini kita paham betapa dasar dan konstitusi kita begitu memuliakan peran agama dalam pembangunan seolah ingin mengatakan bahwa fitrahnya manusia itu beragama.

Kedua, penjagaan terhadap hidup dan kehidupan jelas dan terang sekali kita temukan sejak pembukaan (*mukaddimah*) UUD, *Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia*. Hal ini kemudian ditegaskan pada Pasal 28A bahwa *setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*.

Ketiga, penjagaan terhadap akal. Pembukaan UUD 1945 menegaskan salah satu tujuan bernegara adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa*, yang secara pondasional dan komprehensif dijelaskan dalam Bab Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Pasal 31. Ditegaskan bahwa *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*. *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*.

Keempat, penjagaan terhadap keturunan juga diatur secara spesifik merujuk Pasal 27 B, *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Anak-anak keturunan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Kelima, penjagaan terhadap hak asasi manusia. Penjagaan terhadap hak-hak asasi juga sangat maju di konstitusi kita. Bukan saja maju dalam arti area cakupannya yang luas, tapi juga maju dalam pengertian penjagaan atau proteksinya dari (hak-hak) kebebasan yang merusak martabat dan kemanusiaan.

Hak-hak kita sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi tapi pada saat yang sama kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Konstitusi tidak menghendaki hak-hak kebebasan yang kebablasan (bebas tanpa nilai). Sebaliknya harus memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sampai di sini kita semestinya tidak lagi sanksi bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagian besar, jika tidak seluruhnya, telah memenuhi dan/atau memperkuat tujuan-tujuan syariat Islam (*al maqosid syariah*). Pancasila adalah dasar negara yang islami, UUD 1945 adalah konstitusi yang islami. Meski bukan dasar negara Islam dan bukan konstitusi negara Islam, karena sejak awal konsensus kita bernegara tidaklah membentuk negara atas dasar agama tertentu.

Indonesia memang bukan negara agama (dalam arti ada satu agama sebagai agama negara). Tapi, Indonesia jelas bukan negara sekuler liberal (dalam arti memisahkan

atau bahkan menjauhkan urusan agama dari wilayah publik). Indonesia adalah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Indonesia adalah negara beragama. Dan bagi kita umat Islam, Indonesia adalah negara yang islami, negara yang akan lahir sebagai *baldatun thoyyibatan wa rabbun ghafur*. Inilah nasionalisme kita: nasionalisme religius. ■



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DALAM MENJAGA KEINDONESIAAN

Islam adalah faktor penting dan utama (*determinant factor*) bagi ke-Indonesia-an. Sejarah pergerakan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran Islam dan umat Islam. Hal ini membawa dampak tanggung jawab yang besar bagi umat Islam Indonesia, karena sebagian besar permasalahan bangsa ada andil besar umat Islam, sekaligus berdampak besar bagi umat Islam. Pada saat yang sama, solusi atas permasalahan tersebut juga seharusnya ada andil dan kontribusi yang besar dari umat Islam.

Tanpa mengecilkan peran komponen bangsa lainnya, Indonesia merdeka adalah berkah perjuangan ulama dan santri pejuang. Sejarah mencatat dengan tinta emas peran luar biasa Hadratus Syekh KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Bung Tomo, Jenderal Soedirman,

Laskar-Laskar Santri (Hisbulloh, Sabilillah, dll.), KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Natsir dll.

Pembentukan dasar dan konstitusi negara tidak lepas dan terpisah dari kontribusi dan pergulatan pemikiran Islam dan tokoh-tokohnya yang menerima NKRI dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU menyebut Negara Pancasila sebagai "*Darussalam*." Sementara Muhammadiyah menyebut Negara Pancasila sebagai "*Darul Ahdi wa Syahadah*".

Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia jelas negara beragama karena sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 29: Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Islam adalah realitas keindonesia Indonesia menjadi negara muslim terbesar sekaligus negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari wajah dan karakter ajaran Islam yang *washatiyah* (moderat). Dengan realitas tersebut, maju dan mundurnya Indonesia, kebaikan dan permasalahan bangsa Indonesia dipengaruhi dan dikontribusikan oleh umat Islam.

Bagaimana umat Islam memposisikan diri dan mengambil peran kebangsaan yang tepat.

Pertama, umat Islam harus menjadi perekat persatuan. Indonesia adalah negara yang majemuk dalam seluruh aspeknya. Inilah kebesaran bangsa kita yang harus dijaga persatuannya.

Kedua, umat Islam harus menjadi penjaga identitas dan karakter bangsa. Indonesia memiliki karakter khas yaitu Pancasila yang harus kita jaga bersama. Cara paling tepat untuk menjaganya adalah dengan mengamalkan sila-silanya secara konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, umat Islam harus menjadi motor penggerak kemajuan. Umat Islam harus menjadi solusi di tengah tantangan kebangsaan untuk memperbaiki praktek demokrasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerataan pembangunan, masalah moralitas, etika, korupsi, termasuk masalah radikalisme-terorisme di satu sisi dan liberalisasi/sekularisasi di sisi yang lain.

Menjadi muslim yang baik dan istiqomah berarti juga menjadi warga negara yang baik. Tidak ada pertentangan antara Islam dan ke-Indonesia-an. Jika ada pengakuan beragama Islam tapi membawa kemudhoratan bagi bangsa, termasuk menebar kebencian dan permusuhan, kerusakan dan kehancuran, menebar terror dan ancaman, maka itu bukan Islam. Demikian sebaliknya, pengakuan Islam seraya menginjak-injak dan merendahkan ajarannya, juga bukan Islam. Itu semua bukan karakter *wasathiyah* Islam yang mengokohkan ke-Indonesia-an sebagaimana diajarkan oleh Rosululloh SAW. ■



WATAK DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi lahir dari pemikiran dan sistem politik Barat. Demokrasi yang lahir di Barat tersebut memiliki karakter dasar sekularistik dan individualistik. Dalam perkembangannya demokrasi berkembang dan tidak bisa diidentikkan dengan demokrasi Barat ketika dipraktekkan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tiap negara membentuk watak dan karakternya sendiri termasuk dalam menjalankan sistem demokrasi. Terlebih lagi, ketika demokrasi tidak hanya berhenti pada maknanya yang prosedural tapi lebih jauh demokrasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih substansial yaitu kesejahteraan rakyat—dalam seluruh aspeknya, baik material maupun *nonmaterial*, baik kesejahteraan pikiran, raga, maupun jiwa.

Demokrasi Indonesia, jelas dikatakan oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi Barat. Menurut Bung Hatta, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi barat yang mendasarkan pada nilai individualisme. Perbedaan

itu antara lain karena demokrasi Indonesia berdasar kepada rasa kebersamaan, seperti kehidupan dalam keluarga.

Bung Karno: *"Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri-sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya."* (Soekarno, 1958).

Di antara karakter khas bangsa Indonesia adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan atau negara yang religius. Dengan paham tersebut, kita tidak menganut paham sekuler yang ekstrim, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat/komunitas seperti di Barat. Meski kita juga bukan negara agama, dalam arti hanya satu agama yang diakui menjadi dasar negara Indonesia.

Menjadi *relegius nation state* maknanya adalah negara melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Lebih dari itu agama didorong untuk memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan norma dan etika sosial. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan indonesia. Dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang diantara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat

berkembang secara terhormat diantara bangsa-bangsa (Asshidiqie, Jimly, 2005).

Watak yang lainnya dari demokrasi Indonesia adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Acapkali ketika kita membicarakan watak demokrasi Indonesia secara eksplisit dimanifestasikan sebagai sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Ketika mengelaborasi pikiran tentang sila tersebut, para pendiri bangsa tidak memaknai demokrasi secara sempit soal politik an-sich tapi lebih jauh juga soal kesejahteraan sosial.

Demikian yang dikatakan Bung Karno, *"Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat; tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang seadil-adilnya."*

Secara eksplisit Bung Karno memberikan pembeda antara demokrasi kita dengan demokrasi Barat, bahkan pesannya jelas bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat, dan demokrasi Barat sama sekali tidak (dapat) dijadikan imaji bagi demokrasi Indonesia. Apa yang dimaksud demokrasi Barat dalam narasi tersebut sejatinya menysasar pada suatu *ideal type* dari demokrasi liberal yang berbasis pada individualism. Liberalisme-individualisme dianggap sebagai jangkar dari kapitalisme yang pada

perkembangannya—terutama dalam konteks saat itu—mendorong kolonialisme dan imperialisme (MPR, *Buku Empat Pilar*, 2012).

Demokrasi Indonesia dengan sendirinya merupakan antithesis demokrasi Barat yang liberal dan individualis karena liberalisme dan individualisme sejatinya tidak memiliki akar sosiologis kebangsaan Indonesia. Bung Karno menyebut puncak nilai dan identitas kebangsaan Indonesia sebagai “gotong royong”. Karakter gotong-royong inilah yang kemudian termanifestasi dalam karakter kebangsaan Indonesia. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong royong (yang berkeadilan dan berkeadaban) bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif.

Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “bhinneka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Pun demikian, prinsip demokrasiya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Dan terakhir, prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme (MPR, *Buku Empat Pilar*, 2012).

Dari alam pikiran kebangsaan para pendiri bangsa dapat disimpulkan ada tiga ciri utama yang dianut dalam “demokrasi Indonesia” yaitu: (1) kerakyatan (daulat rakyat); (2) dimensi etik dari demokrasi: hikmat kebijaksanaan; dan (3) permusyawaratan (kekeluargaan).

Bung Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya (Hatta, 1957).

Perhatian pada orientasi etis (hikmat kebijaksanaan) memberikan ruh bagi demokrasi Indonesia untuk berdiri tegak di atas daya rasionalitas, kearifan untuk mencapai konsensus, bukan relasi menang kalah (*win lose*), bukan saling adu kuat, sehingga mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (*mayorokrasi*) dan kekuatan minoritas elit politik dan pemodal (*minorokrasi*).

Selanjutnya, watak demokrasi Indonesia secara eksplisit dimanifestasikan sebagai sila keempat Pancasila: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Ketika mengelaborasi pikiran tentang sila tersebut, para pendiri bangsa tidak memaknai demokrasi secara sempit soal politik an-sich tapi (jauh lebih penting) juga soal kesejahteraan sosial, yang disebut sebagai demokrasi yang bermakna (*meaningful democracy*) atau demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*). ■



OTOKRITIK DEMOKRASI KITA

Demokrasi Indonesia sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa sejatinya mengarah pada upaya untuk menghadirkan demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang menghadirkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Secara proses, demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang bisa mengubah kebebasan menjadi keteraturan dan kompetisi (persaingan) menjadi kerjasama (kooperasi). Demokrasi memang memberikan ruang bagi kebebasan, tapi bukan kebebasan yang tanpa batas. Batasannya adalah keteraturan publik (public order). Dalam konteks kehidupan berbangsa kita pesan itu tegas disuratkan dalam konstitusi Pasal 28J serta pasal-pasal tentang hak dan kewajiban.

Pasal 28J UUD 1945 menyatakan setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak

dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Demokrasi di Indonesia yang lahir seiring reformasi 1998 sejatinya dilengkapi dengan pedoman etik yang kuat agar tetap terkendali dan tidak kebablasan, yaitu berupa TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ada juga TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP terakhir bahkan terbit bersamaan dengan lahirnya reformasi yang menandai awal proses demokratisasi di negara kita.

Berdasarkan TAP tersebut secara optimistik kita bisa katakan bahwa bangunan demokrasi Indonesia mempunyai perangkat regulasi penunjang sistem yang memadai. Ada liberasi (kebebasan) yang diakui, ada hak-hak yang dijunjung tinggi, tapi ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama.

Dengan demikian, berbicara soal demokrasi yang lebih bermakna substansial (berkualitas) syaratnya yang pertama-tama dan paling utama adalah penegakan hukum, aturan, dan etika bernegara yang konsisten dan konsekuen sehingga kebebasan tidak menjadi liar (kebablasan) tapi mengarah pada keteraturan.

Demokrasi juga memberi ruang bagi kompetisi, tapi bukan kompetisi yang mematikan (*win-lose*). Dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Acapkali hal itu berujung konflik, baik konflik kepentingan maupun gagasan. Akan tetapi demokrasi sendiri hakikatnya adalah mekanisme resolusi bagi konflik-konflik yang terjadi.

Dalam pandangan struktural demokrasi adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus (Alfian,1978: 236; Surbakti, 1999:228). Oleh karena itu, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada 'penyelesaian' dalam bentuk kesepakatan. Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.

Beban terbesar untuk menghadirkan demokrasi yang matang itu ada pada elit yang mewakili rakyat untuk mengatur urusan dan kepentingan negara, setelah para elit ini dipilih melalui proses elektoral (pemilu). Tugas rakyat sebagai pemberi mandat selesai (untuk sebagian besar) ketika mereka telah memilih pemimpinnya. Dan tugas elit pemimpin (untuk sebagian besar) segera dimulai menjadikan demokrasi bermakna bagi rakyat.

Kita patut bersyukur bahwa demokrasi menjadi pilihan sistem bernegara—sekaligus menegaskan bahwa demokrasi masih menjadi pilihan terbaik diantara sistem lainnya. Demokrasi memberi ruang deliberasi yang setara bagi seluruh rakyat untuk terlibat dan berpartisipasi, untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajiban, serta menjaga ke-indonesia-an yang demikian majemuk. Di sisi lain, kita

merasakan demokrasi yang kita jalani belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi dalam imaji dan semangat para pendiri bangsa yang tertulis jelas dalam Pancasila dan UUD 1945.

Demokrasi kita cenderung liberal, individualis, dan kapitalistik yang nampak antara lain dari perhelatan pemilu dan pilkada. Sistem dan praktek pemilu lebih mengedepankan/menonjolkan aspek popularitas dan modalitas (materi), nyaris menutup ruang—kecuali hanya sedikit—bagi penguatan aspek kapabilitas dan integritas. Sistem dan praktek kampanye berbiaya mahal menyebabkan pemilu menjadi padat modal, mendorong partai-partai dan para calon berlomba-lomba mencari dana kampanye meski terkadang dengan cara-cara tidak masuk akal termasuk dengan berhutang, menggadaikan ragam harta miliknya. Akibatnya banyak calon stres ketika tidak terpilih. Pun yang terpilih mencari ragam cara untuk mengembalikan modal kampanye termasuk dengan cara-cara koruptif.

Pemilu dan pilkada juga didominasi persaingan tak sehat dan liberalistik, seolah ia menjadi tujuan utama, sehingga menghalalkan segala cara. Aturan banyak dilanggar dan disiasati dengan cara-cara yang culas. Pemilu-pilkada menjadi kontestasi yang menang-kalah sesama anak bangsa. Rakyat pun terbelah secara diametral dalam konflik dan kepentingan, bahkan beberapa kasus hingga berdarah-darah hingga jatuh korban jiwa. Tentu, dengan model pemilihan yang demikian sulit diharapkan pemimpin yang berkualitas (kompeten dan berintegritas).

Pada level kenegaraan dan pengambilan kebijakan kita juga masih menemukan dimana hikmat kebijaksanaan

dan tradisi permusyawaratan (kekeluargaan) belum dipraktekkan secara optimal. Adekuat kepentingan pribadi, partai, golongan masih lebih menonjol ketimbang kebutuhan untuk memenangkan kepentingan rakyat. Konflik antar lembaga negara bahkan antar lembaga penegak hukum mencuat akibat keinginan menang sendiri dan miskin koordinasi. Akibatnya banyak kebijakan jauh dari harapan rakyat, masalah menjadi berlarut-larut, menumpuk, bahkan tak terselesaikan sehingga rakyat jua yang dikorbankan.

Demokrasi yang substansial diawali dengan pemilu yang bermartabat. Perdefinisi pemilu bermartabat harus melahirkan para pemimpin berkualitas (baik di eksekutif maupun legislatif) untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kualitas pemimpin diukur dari integritas, komitmen, kompetensi dan keterampilan dalam menghadirkan terobosan kebijakan yang pro rakyat.

Kualitas pemilu diukur dari tiga faktor penting pemilu: calon, pemilih, dan penyelenggara. Ketiganya harus berjalan dalam satu sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Soal calon, bagaimana bisa menghadirkan calon yang benar-benar berintegritas dan berkualitas. Di sini kita bicara: sistem dan kualitas rekrutmen serta kualifikasi/syarat calon. Soal pemilih, bagaimana pemilih dapat memilih secara objektif dan rasional berdasarkan kualitas calon. Di sini kita bicara: sistem kampanye, kontestasi gagasan bukan modal, pencegahan politik uang dan politisasi birokrasi. Hari ini kita dihadapkan pada fenomena *money politic* yang marak.

Demokrasi tidak akan menghasilkan pemimpin berkualitas jika ukuran keterpilihan adalah uang/kapital. Lingkaran setan korupsi dimulai dari pemilu yang padat modal, bukan kaya ide dan gagasan yang dipertarungkan. Soal penyelenggara, bagaimana menjamin independensi dan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Meski demikian KPU-Bawaslu dituntut untuk semakin kuat dan efektif dalam mensosialisasikan pemilu berkualitas, menegakkan aturan, dan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta pemilu.

Dengan semua catatan di atas, kita semua perlu melakukan refleksi dan evaluasi perjalanan dan pelaksanaan demokrasi kita, bukan untuk saling menyalahkan, akan tetapi menandakan bahwa kita perlu kembali pada jati diri dan karakter demokrasi Indonesia yakni demokrasi yang dibangun di atas hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan—bukan demokrasi liberal, individual, dan kapitalistik. ■



PARADIGMA NEGARA PELAYANAN

Tujuan bernegara kalau mau kita sederhanakan adalah “melayani rakyat”. Dimensi pelayanan publik (*public services*) ini penting karena merupakan alasan utama (*raison d’etre*) lahirnya negara sebagai sebuah kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan rakyat untuk mengatur dan mengurus hidup mereka.

Tema pelayanan rakyat ini pula yang seharusnya menjadi fokus kerja politik dari partai politik manapun. Kita ingin terus mendorong dan menghadirkan negara yang benar-benar melayani rakyat. Apalagi kita sepakat membangun sistem demokrasi yang lebih substantif untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi substantif adalah demokrasi yang bekerja untuk memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Jadi, tugas utama negara yang dipersonifikasi oleh para pemimpin dan pejabat publik adalah melayani rakyat, bukan melayani elit, kelompok, dan partai pendukungnya.

Dalam konsep pemerintahan ada dua kategori tata kelola pemerintahan: *good governance* dan *bad governance*. Ada sembilan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, ketaatan hukum (*rule of law*), transparansi, responsif, berorientasi solusi/konsensus, kesetaraan (*equity*), efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Negara dan pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan sendirinya masuk dalam kategori *bad governance*.

Kita harus jujur mengakui bahwa negara kita belum benar-benar menerapkan *good governance*, sehingga perlu didorong terus upaya reformasi tata kelola negara dan pemerintahan. Praktek buruk yang masih kerap terjadi dalam pemerintahan berupa korupsi, politisasi birokrasi, maladministrasi, dan lain-lain.

Untuk itu setidaknya ada empat sasaran perbaikan dan penguatan. **Pertama**, kita harus serius membangun budaya melayani, bukan dilayani. Ubah paradigma pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat. Istilah pejabat publik semestinya juga harus direvisi dengan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Islam, khalifah sering disebut sebagai *qodimul ummah*.

Kedua, kita harus serius membangun dan mengembangkan sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen dan tata kelola SDM pemerintahan.

Ketiga, tidak ada pelayanan yang baik tanpa pertanggung jawaban publik. Maka kita harus serius membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintahan meliputi kinerja pelayanan, keuangan, dan administrasi. Rumusnya sederhana:

kewenangan tanpa akuntabilitas akan menghasilkan korupsi.

Keempat, untuk menegakkan prinsip akuntabilitas maka diperlukan satu sistem pengawasan yang kuat dan melekat, yang mencegah perilaku maladministrasi dan korupsi. Inilah penyakit birokrasi kita yang harus kita berantas tuntas. Stop korupsi dan maladministrasi.

Kelima, penguatan sistem regulasi (perundang-undangan) yg komprehensif dan sinergis dari pusat hingga daerah yang mementingkan dimensi pelayanan publik. Undang-undang dan regulasi bertindak sebagai agen untuk melakukan perubahan dan rekayasa sosial sehingga proses pelembagaan birokrasi yang melayani semakin kuat. ■



MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Innallaaha ya`murukum an tu`addul-amaanaati ilaa ahlihaa wa idzaa hakamtum bainan-naasi an tahkumuu bil-`adl,.. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.. (An-Nisa: 58).

Di antara sumber kerusakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah jika hukum tidak ditegakkan secara berkeadilan. Bukan saja hak-hak warga negara tidak dapat terpenuhi dengan baik tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) kepada sesama warga bangsa dan institusi negara.

Dalam hal ini ada dua titik tekan, satu, hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran. Ini yang dinamakan supremasi hukum. Dua, hukum ditegakkan secara berkeadilan. Inilah misi dan tujuan utama dari penegakan hukum.

Tegaknya supremasi hukum akan melahirkan suatu kepastian. Kepastian tentang yang benar (*al-haq*) dan mana yang salah (*al-bathil*). Keadilan menuntut kejujuran dan objektivitas, artinya tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan rasa keadilan itu sendiri.

Kita kerap mendengar pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bersupremasi hukum. Itu artinya hukum menjadi panglima di republik ini. Akan tetapi, jujur kita akui wajah supremasi hukum kita masih karut-marut. Potret pelanggaran hukum terjadi dimana-mana.

Ambil contoh, kalau kita duduk di pinggir jalan saja, dengan mudah kita menemukan banyak pelanggaran hukum sederhana terjadi: serobot lampu merah atau markah jalan, berkendara tanpa helm, kendaraan naik trotoar, buang sampah sembarangan, dll.

Pelanggaran hukum lain yang lebih besar pun terjadi dan menjadi berita sehari-hari mulai dari penipuan, perampokan, pelecehan, pembunuhan, transaksi narkoba, hingga perdagangan manusia, pembalakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan korupsi. Tidak sedikit dari pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh orang-orang terpendang mulai public figure, pengusaha hingga pejabat negara bahkan aparat.

Mirisnya kita mendapati persepsi penegakan hukum seperti 'tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.' Hukum juga masih dipersepsi tebang pilih. Hukum tidak berpihak pada korban dan rakyat miskin. Ini artinya hukum tidak atau belum memenuhi rasa keadilan.

Kita mendukung supremasi hukum di republik ini. Lebih dari itu, kita membutuhkan hukum yang tegak secara berkeadilan.

Pertama, kita butuh hukum yang berdiri tegak, berdiri di tengah, dan tidak condong pada kepentingan kekuasaan. Kedua, kita butuh hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam kepada yang bawah (rakyat jelata dan kawula alit) tapi juga harusnya lebih tajam kepada pelaku kriminal elit dan kelas atas.

Ketiga, kita butuh hukum yang bisa membedakan antara kriminal (murni) dan kriminalisasi (kasus). Keempat, kita butuh proses hukum yang bijak melihat suatu kasus menyangkut kelompok lemah dan kelompok rentan dan mendukung upaya *restorative justice* sehingga terpenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemimpin dan penegak hukum yang adil mendapat tempat istimewa di mata Allah dan Rasulullah SAW.

Pertama, Rasulullah SAW menekankan betul pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara hukum. Beliau bersabda, *"Barang siapa yang menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan."* (HR Tirmidzi).

Kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tiga tipologi hakim dalam memutus perkara. Beliau bersabda, *"Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga."* (HR Tirmidzi).

Ketiga, Rasulullah SAW menekankan betapa beratnya tanggung jawab seorang hakim di hadapan Allah SWT. Beliau bersabda, *"Barang siapa mengharap menjadi seorang hakim maka (tugas dan tanggung jawab) akan dibebankan kepada dirinya. Dan barang siapa tidak menginginkannya maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong dan membimbingnya dalam kebenaran."* (HR Tirmidzi). Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan suatu hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau."* (HR Tirmidzi).

Oleh karena itu, kita sangat menaruh hormat kepada setiap aparat penegak hukum yang masih tegar dan setia membela kebenaran dan keadilan. Kita semua berharap supremasi hukum tegak di republik ini dan hukum tegak membela kebenaran dan keadilan. ■



NASIHAT BAGI PEMIMPIN

Sebaik-baik pemimpin adalah yang melayani rakyatnya. Bahasa pelayanan harus menjadi bahasa universal kepemimpinan dimana saja, apalagi dalam sistem demokrasi hari ini dimana pemimpin itu dari rakyat, dipilih oleh rakyat, maka harus bekerja untuk rakyat. Siapa rakyat kebanyakan? Mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, pas pasan, bahkan sebagian dalam kemiskinan atau diambang kemiskinan. Ini yang jadi prioritas kebijakan agar kondisinya terangkat dan terberdaya.

Pemimpin membangun kerjasama, sinergi dan kolaborasi serta membangun sistem yang baik. Kita tidak menciptakan superman, tapi kita menciptakan tim yang solid dan kuat karena sebaik-baik orang adalah yang mampu membangun tim yang kuat untuk kepentingan bersama. Di sini ada nilai dan semangat gotong royong.

Kepemimpinan harus optimis sekaligus kreatif dan inovatif, sebagaimana seorang anak muda Salman Alfarisi

yang menyarankan membangun parit saat Perang Khandaq dan harus jadi dalam enam hari enam malam. Panjang parit diperkirakan mencapai 5.544 meter, lebar 4,62 meter, dan kedalaman 3,2 meter. Disebutkan pula bahwa panjang parit itu sekitar 5.000 hasta dan lebarnya sembilan hasta. Maka, setiap 10 orang mendapat jatah untuk menggali sekitar 40 hasta.

Rasululloh SAW menerima usul anak muda cerdas itu padahal parit tidak ada dalam tradisi orang Arab dan strategi perang masa itu. Tapi harus ada strategi yang *out of the box* karena pasukan muslim hanya 3000 orang dan harus menghadapi pasukan quraaisy 10.000 orang.

Pemimpin harus bisa merebut hati rakyatnya, *kasbul qulub*, memberi semangat yang tangguh pada mereka. Belajar dari Rasululloh, dalam kondisi yang sulit dan krisis Rasululloh mengatakan kita akan menaklukkan Persia, Syam, Syiria, Palestina. Hal itu tidak ada dalam imajinasi rakyatnya saat itu. Bagaimana mungkin?

Pemimpin harus merakyat, bukan tinggal di menara gading, tapi turun ke masyarakat. Sekali lagi *kasbul qulub*. Politisi, negarawan, sekaligus da'i ada dalam pemimpin. Murah senyum kepada rakyat karena senyum adalah sedekah. Berikan pelayanan terbaik. Jadilah pemimpin milik semua umat, milik semua kalangan, dan milik seluruh bangsa. Maka pemimpin itu akan dicinta rakyat dan bangsanya.

Pemimpin siap turun. Siap dimarahi bahkan harus siap dimaki. Tiap pernah mengeluh. Pemimpin tidak boleh ada rasa benci pada sesama. Kesabaran harus lebih besar. Yang sudah *kasbul qulub* pertahankan. Yang benci sekalipun

ambil hati mereka. Mengambil hati jauh lebih baik daripada menang sendiri.

Pemimpin harus memudahkan bukan mem-persulit. Harus memberi kabar bahagia bukan kabar sedih terus. Pemimpin di hadapan rakyat seperti orang tua bagi mereka. Anaknya macam-macam perilakunya, maka perlakuan kepada mereka juga berbeda-beda. Ada yang dinasehati dengan kata-kata cukup, ada yang dinasehati dengan tegas sedikit, ada yang harus disanksi. Sama seperti dokter, resepnya berbeda-beda untuk tiap pasien tergantung gejala dan hasil pemeriksaan.

Pemimpin harus saling ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Sayyidina Ali r.a., suatu kebenaran tanpa aturan main yang jelas, atau tidak teratur, maka yang batil bisa mengalahkan yang haq. Pemimpin harus profesional, sesuai aturan, menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai (*fit and proper*). Berbicara kepada mereka sesuai level amanah dan jabatannya.

Ketika Nabi ditinggal wafat Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Abu Thalib, beliau pergi ke Thaif, dilempari batu hingga berdarah. Ketika tiba di satu kebun korma beliau duduk membersihkan darah, beliau berdoa mendoakan orang-orang yang zalim dan mengadu kepada Allah bukan keluh kesah tapi mengharap cinta-Nya. Pemimpin harus ada waktu-waktu mengadu kepada Allah, bukan menggantungkan pada diri sendiri dan timnya sehingga ujub dan takabur. Libatkan Allah dalam kepemimpinan. ■



BERPOLITIK UNTUK MEMBANGUN BANGSA DAN PERADABAN

Berpolitik kata Ibnu Khaldun, ilmuwan politik Islam, adalah sarana menuju keteraturan dan sebuah cara menuju peradaban. Dengan demikian, politik pada dasarnya merupakan laku lahiriyah manusia yang menjadi sunnatullah eksistensinya di dunia. Aristoteles menyebut manusia sebagai "*zoon politicon*" atau makhluk politik. Dua karya magnum opus, Republic-nya Plato dan Politics-nya Aristoteles, menjelaskan bahwa sejatinya politik itu agung dan mulia yakni sebagai wahana membangun masyarakat utama. Sebuah masyarakat berkeadaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, norma, dan aturan sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebut *a perfect society*; bagi Aristoteles, politik adalah cara meraih apa yang disebut *the best possible system that could be reached* (Hacker 1961).

Dalam ajaran Islam, manusia adalah makhluk Allah yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah-Nya yang mengemban tugas *isti'maru al-ardh*, memakmurkan bumi dengan syariat-Nya. Kalau khalifah kita artikan sebagai kekuasaan, maka untuk mencapai kekuasaan itu politik tidak mungkin dihilangkan. Artinya manusia adalah satu-satunya makhluk yang berpolitik, karena Allah tidak mengirim atau membebankan amanah sebagai khalifah-Nya kepada selain manusia.

Orang yang tidak dapat hidup berkelompok dan dengan modal kebebasannya tidak memiliki kebutuhan politik sama dengan binatang. Maka sifat politik adalah kekhususan manusia. Setiap manusia adalah *rajulun siyasi* (politisi). Manusia yang tidak mengerti politik adalah bukan lagi manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Politik dalam Islam disebut "*siyasah*" yang bermakna mengatur urusan ummat, yang dilaksanakan oleh negara (pemerintah) maupun ummat. Dalam al-qur'an tidak tertulis secara tekstual mengenai kata siyasah. Namun dalam QS. Annisa: 58-59 membahas tentang menyerahkan amanat dan penghormatan kepada pemimpin. Arti ayat tersebut:

~"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

~"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S Annisa: 58-59)

Dua ayat dalam Q.S Annisa di atas adalah dasar yang telah diturunkan oleh Allah Swt dengan wahyu sebagai pokok pertama didalam mendirikan sesuatu kekuasaan, atau suatu pemerintahan, sekaligus untuk menaati pemimpin yang memimpin umat.

Yang pertama adalah isyarat untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Tegasnya, hendaklah seluruh pelaksana pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanat, orang yang ahli. Hak pertama ialah pada rakyat, atau dalam istilah agama, pada ummat pilihan utama puncak pimpinan Negara, yang juga bisa disebut dengan khalifah, sultan dan presiden.

Yang kedua ialah pemerintah untuk menaati Allah Swt. Rasul dan Ulil amri (pemimpin), dengan syariat tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Swt yang terdapat dalam al-qur'an dan al-hadist yang menjadi petunjuk hidup ummat Islam.

Pengertian politik (*al-siyasah*) dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan

jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriyah saja.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at. Tujuan itu ialah: (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Dari pengertian itu, menurut KH. Sahal Mahfudh (2004), Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani mau pun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi, *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin

harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat).

Dalam kitab-kitab klasik ulama terdahulu kita menemukan referensi yang sangat kuat dan memadai tentang pentingnya dan betapa strategisnya peran politik (bernegara) dalam Islam. Kita bisa membaca misalnya "Muqaddimah" karya Ibn Khaldun atau "Al-ahkam As-sulthaniyyah" karya Imam Al Mawardi serta banyak kitab-kitab politik lainnya yang menjadi rujukan bagaimana Islam mengatur politik dan ketatanegaraan. ■



NASIHAT BAGI PARA PEJUANG POLITIK

Menjadi politisi, pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif adalah posisi yang terhormat (*noble*). Namun kehormatan itu harus dipahami berbanding lurus dengan etika dan tanggung jawab kepada publik. Oleh karena itu kita membiasakan menyebut para politisi sebagai pejuang politik karena tujuan mulia yang diemban para politisi yaitu memperjuangkan kemaslahatan umum (bangsa dan negara).

Pertama, sebagai politisi dan partai politik, pasti harapannya ingin menang, berkuasa dan memimpin pemerintahan baik di level pusat maupun daerah. Namun apa tujuan politisi menang dan akhirnya berkuasa atau memerintah negara. Tentu kita semua berharap menang bukan sembarang menang, tapi menang untuk menebarkan kebaikan bagi negeri ini. Untuk memberikan kontribusi terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Agar Indonesia maju dan sejahtera. NKRI jaya dalam percaturan bangsa-

bangsa. Sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kita.

Maka bagi setiap politisi, jangan ada pikiran untuk merusak bangsa dan negara ini, tidak boleh ada pikiran untuk melemahkan bangsa ini dengan seluruh karakter dan kebaikan yang melekat padanya. Apalagi politisi partai Islam yang terus berjuang untuk membangun senyawa antara keislaman dan keindonesiaan, antara keimanan dan nasionalisme, sebagaimana para ulama dan tokoh bangsa telah menyontohkan di masa lalu. Kita ingin menampilkan wajah islam yang rahmatan lil alamin, islam yang penuh kedamaian, toleransi, dan semangat persatuan. Islam yang moderat atau *wasathiyah*, islam yang solitif, berkarakter dan berkemajuan. Dalam konteks tersebut para pejuang politik hadir untuk menjaga dan menyemarakkan ke-indonesiaan bukan dengan menghormati dan memajukan budaya bangsa.

Kedua, perlu kita pahami dan pahami berulangkali bahwa Indonesia tanah air kita ini bangsa yang sangat besar, beragam budaya, suku bangsa, dan agama. Kita kaya dengan sumber daya manusia, kaya sumber daya alam, jutaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) ada di sini. Kita kaya sumber daya mineral yang valuasinya bisa ratusan, ribuan bahkan jutaan triliun, dan seterusnya. Kita punya seluruh potensi menjadi bangsa besar. Sayangnya semua potensi itu belum menjadi aktual. Maka jangan pernah ada pikiran untuk mengecilkan bangsa ini. Kita ingat betul pesan Bung Hatta, proklamator kita, jangan sampai bangsa yang besar ini bertemu dengan manusia-manusia kerdil. Para pejabat publik haruslah manusia-manusia dengan jiwa besar yang punya pemikiran besar untuk memajukan bangsa ini.

Ketiga, selain memahami kebesaran bangsa dan negara Indonesia, kita harus memahami akar permasalahan bangsa dan solusinya agar kita bisa maju. Untuk itu kita harus menyelami denyut nadi masyarakat kita, bergaul dan berinteraksi dengan mereka, kebersamai mereka dalam segala keadaannya. Masyarakat itu sifat dan karakternya macam-macam. Ada yang baik, ada yang beringas, ada yang banyak tingkah, dan seterusnya. Pejabat publik harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin mereka. Dalam konteks tersebut, pemimpin bangsa ini dalam level apapun semestinya memposisikan diri sebagai seorang ayah, dan memperlakukan rakyatnya yang beragam sifat dan karakter itu sebagai anak-anaknya. Maka seorang ayah akan sayang dan berlaku adil kepada anak-anaknya, dan adil itu tidak harus sama rata tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anaknya.

Kita melihat akar masalah bangsa ini belum sepenuhnya bisa bersatu, bekerjasama, dan berkolaborasi secara tulus untuk membesarkan bangsa kita. Di sana-sini masih ada kepentingan pribadi dan golongan yang lebih ditonjolkan, masih kuat ego pribadi dan ego sektoral yang dipertontonkan, sengkabut kepentingan oligarki yang merusak demokrasi dan sendi-sendi kebangsaan. Dalam kondisi demikian, PKS berharap betul dan bekerja serius untuk memunculkan sosok pemimpin yang adil, tulus, profesional dan berintegritas.

Dengan pemahaman di atas seorang politisi apalagi pejabat publik harus pandai-pandai menempatkan diri ketika tampil di depan publik. Pertama, rakyat suka jika politisi dan pejabat publik itu tampil konsisten dan elegan dalam berpolitik. Tidak sibuk berpolemik, tapi selalu hadir dalam urusan-urusan publik. Hadir itu berarti memahami persoalan,

mampu berkomunikasi dengan baik, melakukan edukasi dan membangunkan kesadaran publik, serta memberikan solusi yang jitu atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kedua, publik juga suka politisi yang selalu memberikan semangat dan optimisme melalui sikap, pendapat, dan pandangannya. Tidak terseret arus pragmatisme dan oportunisme yang kerap dipertontonkan secara vulgar. Publik suka pejabat publik yang terbuka, humble dan tidak berjarak. Di sini kita semua berharap seluruh pejabat publik mampu menjadi teladan dan oase bagi rakyat dengan menghadirkan konsistensi dalam membela kepentingan rakyat. Konsistensi dalam melayani dan membantu rakyat. Serta konsistensi dalam menampilkan politik yang bermartabat sesuai koridor nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. ■



PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN TANGGUNG JAWAB KITA HARI INI

Salah satu nikmat terbesar bangsa Indonesia yang wajib senantiasa kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini. Semakin besar syukur kita, karena konstitusi negara kita mendeklarasikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karenanya bangsa dan negara Indonesia punya tanggung jawab peradaban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Vision statement ini merupakan visi peradaban yang luar biasa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa yang menunjukkan betapa bangsa kita anti penjajahan dan penindasan. Visi itu juga menyiratkan pesan bahwa betapapun bangsa Indonesia cinta perdamaian, tapi bangsa ini jauh lebih cinta kemerdekaan, tegaknya kedaulatan dan keadilan.

Setiap kali kita memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan itulah momentum untuk mengokohkan komitmen kebangsaan kita. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan estafeta perjuangan dalam bentuk yang lain yaitu pembangunan. Komitmen kita adalah terus berjuang menuntaskan apa yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa di masanya.

Mereka telah membuka jalan kemerdekaan. Mereka juga telah meletakkan dasar dan konstitusi negara Indonesia merdeka sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka telah memberi peta jalan yang jelas apa yang harus dilakukan setelah kita merdeka. Coba kita simak pesan kebangsaan pendiri republik ini yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia kedua, di sana terdapat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yang bunyi redaksinya sebagai berikut:

“...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Cita-cita kemerdekaan Indonesia tersebut secara jelas memberikan peta jalan apa yang seharusnya kita perjuangkan setelah merdeka.

Pertama, para pendiri bangsa menginginkan kita untuk bersatu. Bersatu rakyatnya, bersatu wilayahnya, bersatu pemerintahannya, bersatu tanah air dan bangsanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat besar. Tidak ada negara sebesar Indonesia dalam kebhinekaan-nya. Tidak mudah menyatukan bangsa ini kecuali dengan komitmen kebangsaan yang kuat. Untuk bersatu kita semua memerlukan titik temu (*kalimatun sawa*), dan titik temu kebangsaan kita adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pedoman kita untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi di bumi Indonesia. Perbedaan adalah sunnatulloh, bahkan satu diantara anugerah Allah SWT. Bukan perbedaan-nya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. "Bhinneka" adalah kekayaan kita, "Tunggal Ika" adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia.

Bangsa Indonesia akan mencapai kemajuan jika setiap kita memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Komitmen untuk mengelola kohesifitas sosial di tengah beragam masalah yang berkelindan dengan berbagai macam kepentingan.

Kita belajar dari komitmen kebangsaan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta, dua karakter yang berbeda, Bung Karno yang meledak-ledak dan heroik dalam membakar semangat rakyat. Sementara Bung Hatta yang tertib dan sangat kuat memegang prinsip. Tak jarang mereka berbeda pikiran dan

pandangan tentang keindonesiaan, tapi keduanya memilih untuk bersatu mengalahkan ego masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia.

Kita juga belajar dari komitmen persatuan nasional Muhammad Natsir yang dengan Mosi Integral-nya mampu mengembalikan Indonesia yang tercabik-cabik dalam Negara Serikat ke pangkuan NKRI. Jika hari ini kita acapkali mengatakan “NKRI harga mati” maka semestinya kita tidak boleh melupakan peran Muhammad Natsir dalam menciptakan momentum persatuan nasional pada tahun 1950 di hadapan Parlemen Republik Indonesia Serikat. Tanpa momentum yang beliau ciptakan, sulit rasanya kita membayangkan NKRI sebagai bentuk negara yang kita banggakan hari ini. Muhammad Natsir seorang nasionalis sejati sekaligus cendekiawan muslim dan pemimpin Partai Masyumi.

Kita juga belajar dari komitmen persatuan Indonesia dari Ir. Juanda. Nama lengkap beliau Ir. Juanda Kartawijaya. Diplomasinya mampu menyatukan perairan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Ir. Juanda dengan tegas menyatakan, laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Di kemudian hari kita mengenal diplomasinya sebagai Deklarasi Djuanda 1957 yang menjadi rujukan negara-negara kepulauan lainnya dan diakui di dalam hukum laut internasional (*United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*).

Bangsa ini bangsa besar dalam seluruh aspeknya: wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita

tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan paling NKRI apalagi sambil mengalienasi elemen bangsa lainnya. Sikap yang demikian hanya akan memecah-belah, mensegregasi, menimbulkan disharmoni dan akhirnya disintegrasi bangsa.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian oleh satu dua kelompok. Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan status atau strata sosial ekonomi. Inilah yang kita sebut persatuan Indonesia, sebagaimana para pahlawan telah memberikan contoh bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan persatuan dan bukan dengan perpecahan.

Bung Karno pernah berujar : “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Melawan bangsa sendiri maknanya adalah sikap permusuhan, memecah belah, menyebarkan fitnah, hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) di antara sesama anak bangsa. Ia juga bermakna perilaku kesewenangan, ketidakadilan, kezaliman, hilangnya kepekaan sosial dan rasa empati, termasuk rusaknya integritas dan moralitas di kalangan pemimpin, pejabat publik, elit politik, dan masyarakat pada umumnya. Sikap tersebut bukan saja buruk dan merusak, tapi lambat laun menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran dan menjadikan Indonesia negara gagal (*failed state*). Sikap tersebut juga sangat jelas dilarang agama dan dibenci Allah SWT.

Pesan kedua dari cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah berdaulat. Para pendiri bangsa menginginkan kita

menjadi negara yang berdaulat. Negaranya berdaulat. bangsanya berdaulat, pemimpinnya berdaulat, rakyatnya berdaulat di negerinya sendiri.

Hakikat dari kemerdekaan adalah tegaknya kedaulatan suatu bangsa untuk mewujudkan kepentingan nasional dan tujuan bernegara dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan.

Berdaulat secara politik artinya tidak mengekor dan/atau tidak didikte oleh kepentingan politik negara manapun. Secara internal berdaulat secara politik bermakna lahirnya politik yang bermartabat untuk kepentingan rakyat sebagai antitesis dari politik oligarkhis yaitu politik yang dikuasai dan/atau dikooptasi oleh kepentingan kelompok elit tertentu dan para pencari rente.

Berdaulat secara ekonomi—mengutip Bung Karno—artinya berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Mengembangkan dan mengandalkan sumber daya bangsa sendiri. Menghadirkan kemandirian bagi petani, nelayan, pengusaha, umkm, dan pekerja dalam negeri. Mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan produk dalam negeri. Mengerem kebijakan impor dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan bangsa Indonesia.

Berdaulat secara ekonomi juga bermakna hadirnya sistem perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat sehingga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Hal ini sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional harus mampu meningkatkan pendapatan perkapita rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial dan/atau wilayah. Pembangunan yang bertumpu pada kekuatan kolektif bangsa bukan bergantung pada utang luar negeri yang jelas-jelas menjadi tanggungan generasi yang akan datang. Demikian seterusnya kedaulatan dalam bidang-bidang lainnya.

Pesan ketiga atau pamungkas dari cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah hadirnya negeri yang adil dan makmur. Para pendiri bangsa menginginkan terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah cita-cita tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adil dan makmur hanya bisa diwujudkan jika bangsa dan negara kita merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ketiganya menjadi kondisi yang harus dipenuhi (*conditio sinna qua non*). Oleh karena itu, jika ada pertanyaan reflektif mengapa bangsa kita tidak maju-maju atau sepertinya sulit mencapai kemakmuran. Secara sederhana bisa kita jawab karena kita belum benar-benar merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dan, inilah tantangan kita bersama.

Demokrasi kita berkembang sedemikian rupa tapi sayangnya melupakan makna fundamental dari demokrasi itu sendiri yaitu lahirnya kesejahteraan sebagai manifestasi dari cita-cita adil dan makmur. Demokrasi kita baru menampakkan wajahnya yang prosedural, itupun banyak penggamat, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil yang menilai akhir-akhir ini cenderung mengarah pada otoritarianisme baru sehingga menempatkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan (*declaining*).

Watak demokrasi Indonesia dalam pernyataan-pernyataan Bung Karno maupun Bung Hatta sesungguhnya adalah demokrasi kerakyatan yang secara baik dimanifestasikan dalam sila keempat Pancasila: *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."*

Berbicara demokrasi juga bukan hanya berbicara soal politik *an-sich* tetapi juga tentang ekonomi dan sosial-budaya yang mampu mendatangkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga bukan saja persamaan politik yang kita tuntut, akan tetapi juga persamaan di lapangan ekonomi dan sosial budaya berupa kesejahteraan yang seadil-adinya.

Demokrasi kerakyatan juga bukan soal menang-menangan suara. Bung Hatta mengingatkan kita bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya.

Demokrasi kerakyatan bukan relasi menang kalah (*win lose*), bukan saling adu kuat, sehingga mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (*mayorokrasi*) dan kekuatan minoritas elit politik dan pemodal (*minorokrasi*). Demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang berdiri tegak di atas orientasi etis, daya rasionalitas, dan kearifan untuk mencapai konsensus. ■



KITA TELAH MERDEKA TAPI TIDAK (PERNAH) BERHENTI BERJUANG

Kita memang telah merdeka dalam arti tidak ada lagi bangsa asing yang menduduki tanah air kita secara paksa, tidak ada lagi popor senjata yang menyiksa rakyat jelata, dan tidak ada lagi kerja paksa yang menistakan bangsa kita. Namun apakah kita sudah benar-benar merdeka lalu kemudian kita berhenti berjuang?

Proklamator kita, Bung Karno, pernah berujar: "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Apa makna di balik ujaran Bung Karno tersebut? Bung Karno ingin mengatakan bahwa kemerdekaan bukan akhir, tapi awal dari perjuangan dalam dimensi yang lain yaitu pembangunan.

Di sana akan muncul berbagai permasalahan mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pertahanan dan keamanan, dan berbagai masalah lainnya.

Seluruh permasalahan tersebut akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri.

Tujuan kemerdekaan Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Jika kita lihat realitas bangsa kita hari ini, tentu ada banyak capaian dan kemajuan yang patut kita syukuri, namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masalah yang kita hadapi dan harus kita perbaiki. Masih banyak kondisi yang harus kita perjuangkan.

- Kita masih terus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah dunia.
- Kita juga masih harus berjuang melawan ketidakadilan di berbagai bidang: sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
- Kita masih harus berjuang mewujudkan pemerataan pembangunan, ekonomi kerakyatan, akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
- Kita juga masih harus berjuang mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga terwujud tata kelola negara yang semakin baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- Kita masih terus berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, dan produk dalam negeri. Berjuang mewujudkan kedaulatan petani,

nelayan, dan tenaga kerja kita sendiri. Berjuang untuk lepas dari jeratan ketergantungan hutang luar negeri yang kian hari kian bertambah.

Status negara kita dalam ranking pembangunan dunia bertahan begitu lama sebagai negara berkembang, bahkan baru-baru ini turun menjadi negara dengan pendapatan menengah kebawah (*lower middle income country*). Indeks demokrasi kita tercatat mengkhawatirkan. Indeks daya saing SDM dan peringkat pendidikan kalah tertinggal di bandingkan negara-negara kawasan. Sebaliknya, indeks persepsi korupsi kita tinggi. Tingkat ketergantungan terhadap hutang luar negeri juga tinggi.

Menjadi jelas bagi kita bahwa kemerdekaan bukanlah satu kondisi tidak ada lagi perjuangan. Kemerdekaan adalah estafeta perjuangan dari generasi ke generasi. Prosesnya berkelanjutan bahkan *never ending process* guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Melihat kondisi bangsa kita dengan begitu banyak problematika yang harus diperjuangkan, diperlukan keberanian untuk melakukan transformasi pembangunan di berbagai bidang.

- Kita perlu mentransformasi kebijakan ekonomi, mengatasi masalah struktural yang membuat ekonomi kita timpang terhadap rakyat kecil khususnya para petani, nelayan, buruh, pedagang pasar, kaki lima, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- Kita perlu mentransformasi sistem politik, hukum, dan ketatanegaraan yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, tanggung jawab, kepastian, keadilan, martabat, dan kualitas pelayanan, serta menghadirkan demokrasi yang

substantif dan kebebasan yang bertanggung jawab.

- Kita perlu mentransformasi nilai budaya Pancasila menjadi gerakan kolektif sehingga Pancasila benar-benar lahir sebagai identitas dan karakter bangsa, membentuk budaya *citizenship* (kewargaan). Menjadi pedoman kebijakan negara, etika publik, dan moralitas politik.
- Di atas itu semua kita perlu mengokohkan komitmen kebangsaan kita untuk menghadirkan persatuan dan kesatuan, mewujudkan solidaritas sosial nasional, mengokohkan ketahanan nasional, serta membudayakan tradisi musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong.

Kita tidak perlu saling menyalahkan, yang kita perlukan adalah saling menguatkan. Indonesia ini milik kita bersama dan harus kita jaga bersama-sama, tanpa perlu merasa paling Pancasila dan paling NKRI. Terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk tampil menjadi pejuang masa kini. Problematika dan tantangan kita besar, tapi peluang kita juga tak kalah besar. Pastikan kita menjadi bagian dari penerus estafeta perjuangan bangsa.

- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang ekonomi kerakyatan.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang pendidikan.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang kesehatan.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang politik yang menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat, tampil menjadi negarawan dan bukan oportunis.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang antikorupsi.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang yang menjaga etika dan moralitas bangsa.

- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang kemanusiaan.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang keadilan dan hak asasi manusia.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang demokrasi dan kebebasan yang bertanggung jawab.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang yang menghimpun potensi dan talenta terbaik anak bangsa yang berserakan.
- Bangsa ini butuh pejuang-pejuang bagi kaum mustad'afin, orang-orang lemah.
- dan masih banyak lagi peran perjuangan lainnya untuk mengokohkan NKRI yang kita cintai bersama.

Pastikan diri kita menjadi bagian dari pejuang-pejuang bangsa masa kini. Bangsa ini butuh komitmen, kepedulian, dan pengorbanan kita semua agar merdeka lahir dan batin, menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. *Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem karto raharjo. Baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghafur.* ■



BAGAIMANA KITA MENGHARGAI PARA PAHLAWAN?

Ada satu pertanyaan penting untuk kita sebagai bangsa, dimana kita letakkan para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan Indonesia? Tentu kita semua berharap menjadi bangsa bangsa yang selalu menghormati, menghargai, dan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Menjadi bangsa yang pandai menempatkan para pahlawan sebagai teladan dalam kehidupan, serta menjadikan jiwa dan semangat kepahlawanan tetap bersemayam di dada kita.

Bangsa Indonesia berhutang jasa kepada para pahlawan karena tanpa perjuangan mereka kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Mereka bukan hanya pahlawan bagi bangsa tapi juga pahlawan bagi kehidupan karena kehidupan tanpa kemerdekaan berarti kematian perlahan. Kepada mereka kita ucapkan terima kasih dan kita kirimkan doa terbaik, semoga Allah SWT menerima amal ibadah, pengorbanan, dan perjuangan mereka. *Alfatihah*.

Bung Karno mengatakan: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.” Penghargaan ini kita tunjukkan mulai dari mengenal para pahlawan hingga meneladani pengorbanan mereka. Kata pepatah: “Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta.” Kita perlu instrumen yang efektif untuk lebih mengenalkan para pahlawan. Mengetahui pribadinya. Mengetahui ide dan gagasannya. Mengetahui perjuangan dan pengorbanannya untuk Republik Indonesia. Lalu, setelah mengetahui diharapkan tumbuh kesadaran untuk menghormati, menghargai, dan meneladani mereka dalam dimensi perjuangan dan pengorbanan masa kini.

Saya kira inilah panggilan dan tugas sejarah bagi kita semua, yaitu melanjutkan tradisi kepahlawanan bangsa dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

Sebagai bagian dari keteladanan para pahlawan, kita semua harus punya pemahaman yang benar terhadap bangsa ini. Di antara yang paling penting adalah pemahaman bahwa bangsa ini milik kita bersama. Oleh karena itu jangan berhenti mencintai Indonesia. Jadilah bagian yang menjaga kebesarannya, merawat kebhinekaannya, mengokohkan nasionalismenya, merekat per-satuannya, dan menumbuhkan potensinya. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, setara bahkan lebih hebat dari bangsa-bangsa maju di dunia.

Sebaliknya, janganlah kita menjadi bagian yang menghancurkan bangsa ini dengan sikap dan perbuatan

yang kerdil, picik, culas, koruptif, manipulatif, dan memecah belah di tengah-tengah masyarakat. Jangan merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, merasa paling Pancasila atau paling NKRI, karena bangsa ini terlalu besar untuk diklaim atau dikelola sendirian. Kita perlu bergandengan tangan, gotong royong, bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Itulah yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa dengan pekik kebangsaan: “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

Kita semua bisa menjadi pahlawan masa kini. Tidak dengan kata-kata tapi dengan karya dan tindakan nyata. Menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional dan seimbang, dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Menjadi manusia Indonesia yang taat beragama, mencintai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, membangun kebersamaan dan gotong royong, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ekspresi kepahlawanan itu bisa beragam bentuknya selaras dengan dinamika perkembangan zaman, peluang, ancaman, dan tantangan yang kita hadapi hari ini. Artinya, kita bisa menjadi pahlawan masa kini dalam setiap peran yang kita jalani, dengan menjadi yang terbaik dalam prestasi, karya, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pahlawan akan mengambil peran perubahan dan mencari solusi problematika bangsa. Inilah yang saya sebut di awal sebagai panggilan dan tugas sejarah untuk melanjutkan tradisi kepahlawanan bangsa dengan

menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

Realitas kebangsaan kita hari ini masih dihadapkan pada begitu banyak problematika yang harus diselesaikan. Kita masih terus berjuang untuk lepas dari pandemi covid 19. Dibutuhkan komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama semua pihak agar pandemi ini dapat diakhiri dengan izin Allah SWT.

Kita masih terus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah dunia. Kita juga masih harus berjuang melawan ketidakadilan di berbagai bidang, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi serta ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kita juga masih harus berjuang mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga terwujud tata kelola negara yang semakin baik dan bersih.

Kita masih terus berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, dan produk dalam negeri agar para petani, nelayan, dan tenaga kerja kita bangga dan berdikari. Kita masih berat untuk lepas dari jeratan hutang luar negeri yang kian hari kian bertambah.

Pahlawan tidak akan tinggal diam melihat problematika kebangsaan di atas. Mari kita ambil peran untuk menghadirkan solusi dan perubahan fundamental dalam mengatasi persoalan di atas. Dalam konteks tersebut, Partai Keadilan Sejahtera membuka diri untuk bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh anak

bangsa guna mendorong dan menghadirkan kebijakan negara yang berkeadilan dan berkemajuan sehingga terwujud tujuan kemerdekaan kita: Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. *Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Baldatun toyyibatun wa Rabbun ghafur. Amiin yaa Rabbal 'alamiin.* ■



BAGAIMANA KITA MENGHORMATI PARA ULAMA?

Kita patut berbesar hati bahwa agama Islam menjadi faktor penting ke-Indonesiaan. Hal ini tidak dapat dibantah bahkan diperkuat oleh hasil-hasil penelitian dan kajian para intelektual terkemuka. Dalam satu referensi, misalnya, dikatakan bahwa Nusantara ini disatukan oleh Islam melalui penyebaran agama oleh para ulama sejak awal kedatangannya hingga zaman wali-wali atau yang lebih kita kenal sebagai “Wali Songo”. Sebelum Islam datang, Nusantara terpecah dalam wilayah dan kedaerahan. Ketika Islam datang, Islam menjadi faktor perekat dan pemersatu ke-Indonesiaan.

Ada dua aspek Islam dalam membentuk ke-Indonesiaan. **Pertama**, nilai dan ajarannya sendiri. **Kedua**, aktualisasi peran ulama, habaib, dan umat atau pemeluknya dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

Pertama, dari sisi nilai dan ajaran, Islam agama yang lengkap (*syumul*) tidak terbatas hanya ritual aqidah, ibadah,

dan syariah, tapi juga mengajarkan persatuan, cinta tanah air, serta mengandung spirit perlawanan dan perjuangan untuk membebaskan negeri dari penindasan, penjajahan, dan kebodohan. Inilah yang menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi terbesar dalam upaya melawan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan sepanjang sejarah Indonesia. Di samping itu, Islam dapat diterima luas di Indonesia karena karakter ajarannya yang *wasathiyah* sehingga Islam menjadi realitas sosiologis bangsa Indonesia hingga hari ini.

Kedua, tidak bisa dibantah bahwa ulama dan umat Islam punya peran sejarah dalam merebut kemerdekaan. Bahkan perannya jauh sebelum negara ini lahir. Sehingga sejarah Nusantara dan Indonesia sejak masa kerajaan, pra kemerdekaan, perlawanan penjajahan, hingga terbentuknya negara-bangsa tidak lepas dari peran kesultanan Islam, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh Islam yang amat dominan. Semua peran tersebut tidak keluar dari koridor politik kebangsaan. Apa yang menimpa bangsa ini selalu direspon dengan ijtihad ulama yang memberikan solusi atas permasalahan tersebut, solusi yang berpijak pada kemaslahatan bangsa sebagai manifestasi Islam yang *rahmatan lilaalamiin*. Hal itu nampak kuat dari setiap episode sejarah sejak masa kolonialisme, kemerdekaan, hingga pembentukan dasar dan konstitusi negara dan berlanjut hingga hari ini dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu kontribusi besar ulama nusantara dalam pembangunan Indonesia khususnya dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah hadirnya pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Pesantren sejatinya adalah soko guru pendidikan nasional

yang berkontribusi besar dalam membentuk dan menjaga karakter bangsa. Pesantren juga telah banyak mencetak tokoh dan pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh.

Pesantren telah hadir di Nusantara jauh sebelum lahirnya sistem pendidikan nasional dan terus eksis bahkan berkembang di tengah dinamika kemajuan bangsa. Melalui bimbingan para ulama *amilin fi sabilillah* pesantren menjadi penggerak perubahan di Indonesia termasuk terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pesantren di seluruh Indonesia ada 27.722 dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta siswa. Hal ini menunjukkan potensi dan kontribusi besar pesantren dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan pemimpin Indonesia masa depan.

Pesantren istimewa karena ia mempelajari dan mengkaji bukan saja Al-Qur'an dan Hadits tapi juga warisan ulama dunia yang muhtabar dalam wujud Kitab Kuning. Inilah tradisi keilmuan Islam yang turut mewarnai corak keberagaman di Indonesia. Maka setiap upaya menghidup-hidupkan tradisi keilmuan Islam dan pesantren seperti penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning Fraksi PKS DPR RI ini layak kita apresiasi dan dukung penuh.

Pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama pewaris para Nabi (*ulama warosatul ambiya*) dan para santri di seluruh Indonesia yang terus berkomitmen untuk belajar agama (*tafaqqu fi dien*).

Kedua, sebagai upaya untuk mengajak dan memotivasi generasi bangsa untuk mencintai ilmu dan meneladani ulama ahli ilmu. Kita bisa maju karena ilmu. Bangsa ini

akan maju dengan penguasaan ilmu. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mujadalah Ayat 11, *Yarfaillahulladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darajat*". Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (ilmu) beberapa derajat.

Ketiga, sebagai bagian dari semangat untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius. Nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi Sila Pertama Pancasila dan amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama menjadi ruh kebangsaan Indonesia yang harus tarus dikokohkan ikatannya, bukan dihadap-hadapkan atau dipertentangkan.

Dengan seluruh peran, kontribusi, dan posisi tersebut kita sebagai umat Islam sudah semestinya menjadi yang terdepan dalam mesyukuri nikmat ke-Indonesiaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat dipungkiri adalah warisan ulama dan santri pejuang. Jangan pernah melupakan sejarah ("jas merah") dan jangan pernah menghilangkan jasa ulama dan umat Islam ("jas hijau"). Indonesia memang bukan negara agama (dalam arti ada satu agama sebagai agama negara). Tapi Indonesia adalah negara beragama yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Bagi kita umat Islam, Indonesia adalah negari yang islami. Hal ini sejalan dengan penegasan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama yang menyebut Indonesia sebagai "*Darussalam*" dan Muhammadiyah yang menyebut Indonesia sebagai "*Darul Ahdi wa Syahadah*".

Kita terus berdoa dan berikhtiar agar diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melanjutkan estafet perjuangan para ulama agar negeri yang islami ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, agar Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan berlimpah kebaikan: *baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghafur*.

Terutuk para ulama kita doakan agar ilmu-ilmu mereka senantiasa menjadi penerang jalan bagi bangsa Indonesia. Menjadi suluh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan teruntuk para santri semoga Allah SWT anugerahkan keberkahan ilmu dan dikemudian hari dapat melanjutkan estafet untuk menjadi *ulama amilin fi sabilillah* yang akan menjaga Indonesia selalu dalam keberkahan dan kebaikan. ■



JAS HIJAU : MENYAMBUNG MATA RANTAI SEJARAH PERJUANGAN ULAMA

Salah satu tema penting dalam upaya menumbuhkan kecintaan generasi bangsa pada NKRI adalah mempelajari dan memahami sejarah perjuangan bangsa. Dan diantara pelajaran tersebut terdapat sejarah perjuangan ulama dan umat Islam dalam membela, menjaga, dan mengisi kemerdekaan.

Pemahaman ini bisa meningkatkan kesadaran cinta tanah air di kalangan umat sehingga semakin bertanggung jawab menjaga kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang religius. Di sisi lain, tidak boleh ada upaya memutus mata rantai sejarah perjuangan ulama dan umat Islam.

Tanpa mengecilkan peran komponen bangsa lainnya, faktanya peran ulama dan umat Islam sangat dominan dalam perjuangan kemerdekaan, dalam membangun pondasi negara, dan dalam mengisi kemerdekaan. Ulama

hadir ketika merebut kemerdekaan. Di bawah komando para ulama, para santri dan laskar-laskar umat berjuang melawan penjajah. Maka tidak heran, jika Proklamator Bung Karno sampai secara khusus meminta nasihat kepada Hadratus Syaikh Hasyim Asyari perihal waktu yang tepat untuk memproklamkan kemerdekaan. Atas istikharah Hadratus Syaikh Proklamasi Kemerdekaan dideklarasikan pada *sayyidul ayyam* Hari Jum'at dan *sayyidus suhur* Bulan Ramadhan yaitu 9 Ramadhan 1364 H yang bertepatan tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah merdeka rongrongan penjajah dan pengkhianat ternyata tidak berhenti. Ulama dan santri selalu siap di garda terdepan menghadapinya. Maka kita kenal resolusi jihad Hadratus Syaikh Hasyim Asyari di tahun 1945 dalam menghadapi agresi militer Belanda juga sengitnya perlawanan terhadap pemberontakan PKI tahun 1965 yang ingin mengganti ideologi negara, memecah belah bangsa dan membunuh para ulama.

Selanjutnya, bisa dikatakan bahwa proses pembentukan dasar dan konstitusi negara juga tidak lepas dari peran dan kontribusi ulama, mulai dari proses di PPKI hingga Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan UUD 1945 yang di dalamnya termaktub Pancasila. Di sana ada KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, KH Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso, dan KH Agus Salim.

Kita sampai pada kesimpulan keseluruhan isi UUD 1945 dan Pancasila mencerminkan nilai ajaran Islam yang bersenyawa dengan kebangsaan Indonesia. Sejak saat itu kita menerima negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Tidak ada pertentangan dan dikotomi antara

Islam dan negara, Islam dan nasionalisme. Kita tegak lurus menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai warisan para ulama.

Fatsoen politik ulama dan umat Islam sejak dulu adalah politik kebangsaan. Menginternalisasi nilai-nilai universal agama dalam ruh kebangsaan dan bukan mempertentangkannya. Para pendiri bangsa telah bersepakat tidak membentuk suatu negara agama, tapi Indonesia adalah negara beragama--dengan seluruh keragaman agama di Indonesia.

Maka, kita menyaksikan kebesaran tokoh-tokoh Islam untuk merelakan dihapusnya "tujuh kata dalam Piagam Jakarta" untuk menjaga persatuan nasional, betapapun hal itu sudah disepakati secara bulat pada sidang-sidang PPKI. Kita juga menyaksikan terobosan genuine Ketua Fraksi Partai Masyumi Muhammad Natsir dengan Mosi Integralnya yang mengembalikan dan mengokohkan NKRI sebagai bentuk negara kita. Ini semua membuktikan fatsoen politik kebangsaan umat Islam sejak dahulu," tandas Jazuli.

Dalam perspektif keislaman Indonesia, kita mengamini dan mendukung penuh ijtihad dua ormas Islam terbesar Indonesia yaitu Nahdatul Ulama yang menyebut Indonesia "*Darussalam*" dan Muhammadiyah yang menyebut Indonesia "*Darul 'Ahdi wa Syahadah*". Indonesia ini negara islami karena 'maqosid syariah' termanifestasi secara baik dalam Pancasila dan UUD 1945 karena keduanya memang warisan para ulama pejuang kemerdekaan.

Sebaliknya, Indonesia jelas dan tegas bukan negara sekuler apalagi negara atheis. Bukan negara komunis. Bukan pula negara liberal yang menganut kebebasan tanpa batas. Maka tidak boleh ada yang memaksakan kebebasan

yang melanggar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Inilah tanggung jawab umat Islam untuk menjaga nasionalisme Indonesia yang religius. ■



M. NATSIR, MATA AIR KETELADANAN DALAM MENJAGA INTEGRASI NASIONAL

Ada banyak pahlawan yang berjuang untuk bangsa ini, dari semua kalangan dan golongan, baik yang tercatat oleh negara sebagai pahlawan nasional, dan lebih banyak lagi yang tidak atau belum tercatat jasa dan pengabdianya. Kita bersyukur kepada Allah bangsa ini memiliki mereka dan untuk itu kita berterima kasih dan memberikan penghormatan yang tertinggi dan selayaknya. *Lahum al-fatihah.*

Diantara sekian banyak tokoh pahlawan bangsa yang kita kenal, ada satu nama yang punya jasa besar bagi cikal bakal NKRI yaitu ayahanda kita Muhammad Natsir. Dan diantara sekian banyak jasanya adalah yang hari ini kita bicarakan bersama yaitu Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950. Mosi ini menjadi momentum bersatunya kembali negara bagian Republik Indonesia Serikat kepada NKRI.

Maka tak berlebihan ketika Bung Hatta menyebutkan bahwa Proklamasi Kedua diumumkan secara resmi pada 17 Agustus 1950 setelah Indonesia akhirnya kembali kepada cita-cita negara kesatuan dan tidak tercabik-cabik menjadi negara serikat buatan Belanda.

Ada empat keteladanan yang bisa kita warisi dari perjuangan Muhammad Natsir. Pertama, jiwa dan pikiran M. Natsir yang besar untuk republik. Inilah karakter yang dimiliki tokoh-tokoh besar pendiri republik yang menghasilkan konsepsi besar bagi Indonesia bahkan dunia. Bangsa ini bangsa besar. Butuh konsepsi besar untuk menjaga keutuhannya. Dan konsepsi besar itu hanya lahir dari orang-orang dengan jiwa dan pikiran besar.

Pikiran tokoh-tokoh bangsa kita jauh ke depan, visioner, dan lebih besar dari masalah dan tantangan yang dihadapi pada masanya. M. Natsir hadir pada momen yang tepat dengan Mosi Integral-nya yang mengubah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Sama halnya, Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, melahirkan konsepsi dasar negara Pancasila. Bung Hatta dengan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi. Djuanda Kartawijaya dengan Konvensi Hukum Laut yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda menghasilkan Konsep Negara Kepulauan bagi dunia. Mochtar Kusumaatmaja dengan konsepsi Wawasan Nusantara bagi Indonesia. Dan masih banyak lagi.

Kedua, keteladanan yang patut kita warisi adalah kemampuan M. Natsir dalam menemukan dan membangun titik temu kebangsaan. Beliau adalah seorang tokoh politik yang cerdas, santun dan elegan, pandai berkomunikasi dan jago lobi dalam urusan-urusan kebangsaan, seperti upayanya dalam menyukseskan Mosi Integral di Parlemen

RIS tersebut. Mosi ini beliau susun rapi penuh perhitungan dan strategi. Selama dua bulan beliau meyakinkan seluruh anggota parlemen RIS dari berbagai fraksi dan latar ideologis juga dengan negara-negara bagian agar mosinya bisa diterima dan tidak mudah dijegal Belanda.

Karenanya M. Natsir dihormati kawan dan disegani lawan. M. Natsir yang berasal dari Partai Islam Masyumi adalah seorang nasionalis sejati sekaligus menegaskan bahwa tidak ada dikotomi bahkan tidak ada jarak antara agama dan nasionalisme. Baginya menjadi nasionalis berarti harus agamis. Sebaliknya, menjadi agamis berarti harus nasionalis. Tidak ada perdebatan. Presiden Sukarno bahkan mempercayakan jabatan Perdana Menteri kepada Muhammad Natsir setelah momentum bersejarah tersebut.

Ketiga, M. Natsir mempraktekkan politik adiluhung atau *high politic*, bukan politik pragmatis apalagi oportunis. Kesadaran ini penting kita warisi sebagai prasyarat untuk membangun Indonesia yang bermartabat, maju, adil dan sejahtera. Siapapun kita terutama pejabat publik dari partai dan golongan manapun, tampilkan politik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sebaliknya jauhkan sifat-sifat ambisius dan oportunistik dalam berpolitik yang akan merusak bukan hanya demokrasi tapi juga kohesi sosial dan integrasi nasional kita.

Keempat, M. Natsir adalah tokoh yang mencontohkan semangat transformasi dan kolaborasi dalam membangun bangsa. Dalam konteks Mosi Integral, Natsir serius mentransformasi pikiran bangsa dan wakil-wakil rakyat di Parlemen RIS agar tidak terlena dengan konsepsi negara

serikat, tapi sebaliknya meneguhkan cita-cita negara kesatuan yang lebih relevan dengan perjuangan bangsa. Natsir juga aktif membangun kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa agar cita-cita itu terwujud.

Empat pelajaran tersebut sangat relevan kita tumbuhkan hari-hari ini di saat bangsa dan negara kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kita butuh pemimpin yang negarawan, yang taat konstitusi dan Pancasila yang aktif membangun kohesi sosial, aktif melakukan transformasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, memiliki rasa empati dan kepedulian serta terus menggalang solidaritas sosial nasional. Kita juga butuh kebijakan negara dan pemerintahan di semua level yang terus berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara; yang menyelesaikan persoalan-persoalan elementer masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan hingga masalah-masalah ekonomi dan kedaulatan negara.

Semoga kita semua mampu meneladani dan melanjutkan estafet perjuangan mereka dalam menjaga dan mengokohkan integrasi nasional. ■



SEMANGAT BERKURBAN UNTUK BANGSA

Ibadah kurban adalah syariat Islam yang diambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih puteranya Nabiullah Ismail sebagaimana terekam dalam Surat ash-Shaffat ayat 99-111. Dikisahkan peristiwa Nabi Ibrahim yang mengurbankan putranya Ismail AS atas perintah Allah SWT.

Ismail sendiri merupakan seorang anak yang ia idam-idamkan setelah bertahun-tahun istrinya tidak segera memiliki buah hati. Dalam Surat ash-Shaffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa: "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih." Allah SWT kemudian menjawab doa Ibrahim dan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS dengan kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar.

Ketika anak itu dewasa, Nabi Ibrahim AS diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, *"Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah SWT yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu?"* Ismail menjawab, *"Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar."*

Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim AS membawa Nabi Ismail AS ke sebuah tumpukan pasir dan ia membaringkannya dengan posisi pelipis di atas tanah. Akhir kisah, atas kehendak Allah SWT, melihat kesungguhan dan keteguhan hati Nabi Ibrahim, Allah SWT menggantikan putranya Ismail dengan seekor domba untuk disembelih.

Banyak pelajaran penting syariat kurban yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan musti dipahami dan diteladani oleh seluruh masyarakat khususnya umat Islam.

Pertama, peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan dan keiklasan seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Kholik Pemilik Cinta yang sesungguhnya. Ini sekaligus ajaran tentang ketahanan keluarga dimana Ibrahim berdialog dengan anaknya ketika perintah itu datang. Sangat indah dialognya sehingga tidak semena-mena memaksakan kehendak kepada anak. Dan ketahanan keluarga adalah pilar ketahanan nasional.

Kedua, perintah berkorban ini adalah manifestasi dari kecerdasan emosional dan spiritual manusia. Kerelaan berbagi itu butuh kecerdasan sekaligus menunjukkan kualitas tertinggi seorang manusia di hadapan Allah dan sesamanya.

Ketiga, masyarakat yang siap berkorban maka siap bela negara. Berkorban secara faktual adalah bentuk kepedulian kepada sesama karena ada daging yang dibagikan. Ini bentuk konkrit wawasan kebangsaan bahwa kita semua memiliki negeri ini, mencintai negeri ini, dengan kesiapan berbagi kepada sesama anak bangsa hingga pelosok-pelosok daerah. Kalau berkorban ternak saja untuk dibagikan kepada warga mereka siap, apalagi berkorban untuk negara dan bangsanya. Ini bagian dari wawasan kebangsaan untuk membela tanah air.

Keempat, berkorban punya *multiplier effect* secara ekonomi. Pemerintah semestinya tidak perlu impor daging. Belajar dari kurban ada masyarakat yang menyediakan ternak atau menjadi peternak, ada penjual, bahkan ada yang sekadar dititipi ternak untuk penggemukan. Ini semua bisa menghasilkan bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan.

Kelima, kurban mengandung pesan kolaborasi yang kuat. Bangsa besar ini hanya bisa maju dengan semangat kolaborasi dan kerjasama. Tidak mungkin bangsa ini dibangun hanya satu kelompok, hanya satu partai. Kerjasama adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Keenam, kurban membawa pesan bagi pemimpin. Belajar dari Nabiyullah Ibrahim beliau mendahulukan cintanya kepada Allah dari dirinya dan anaknya. Pemimpin harus demikian, dahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Trust akan muncul kepada pemimpin yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga, bahkan kelompok dan partainya.

Ketujuh, suri teladan itu sangat penting terutama dari para pemimpin dan elit negeri ini. Di tengah banyak kesulitan rakyat, jangan sampai ada *moral hazzard*, jangan korupsi, jangan menyelewengkan bantuan sosial. Sebaliknya wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kikis egoisme, nafsu pribadi yang berlebihan. Munculkan kejujuran dan transparansi. ■



PILAR-PILAR PERADABAN BANGSA

Sebagai insan yang beragama sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, umat Islam harus berusaha menggali nilai-nilai ajaran Islam untuk mengokohkan ke-indonesiaan. Di antara sekian banyak nilai ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana Islam memberikan tuntunan pilar-pilar terbentuknya peradaban suatu masyarakat, bangsa, dan negara.

Pertama, peradaban unggul akan lahir jika seluruh elemen bangsa memiliki komitmen terhadap kebaikan yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT. Hal itu akan mendatangkan keberkahan berupa kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa tersebut, sebagaimana janji Allah SWT dalam Surat Al-A'raf Ayat 97 *"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami),*

maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan," Ini artinya pilar utama peradaban itu ada pada kecerdasan spiritual bangsanya yang tunduk pada kebenaran dan kebaikan.

Kedua, peradaban unggul lahir dari tangan pemimpin yang adil dan bertanggung jawab serta memberi teladan kepada rakyatnya. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl Ayat 90*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."* Bahkan, dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW menyebut pemimpin adil sebagai pihak pertama yang akan mendapatkan nauangan Allah di hari kiamat. Kenapa pemimpin adil, bertanggung jawab dan memberi teladan itu penting, karena di tangan pemimpin yang demikian rakyat merasa tenteram dan terberdaya sehingga bangkitlah potensi bangsanya.

Ketiga, peradaban unggul akan lahir jika suatu bangsa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ukuran kualitas sumber daya jika merujuk firman Allah adalah SDM yang kuat dan amanah (*al-qowwiyul amin*) sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Qashas Ayat 26.....*".....sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."* Kuat di sini maknanya memiliki pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi. Sementara dapat dipercaya maknanya memiliki integritas. Dengan kompetensi dan integritas tersebut SDM bangsa bisa memberi manfaat untuk kemajuan bangsanya.

Keempat, peradaban unggul lahir dari bangsa yang mampu membangun solidaritas sosial di tengah-tengah

masyarakat. Solidaritas sosial ini kunci dalam menghadapi problematika bangsa yang berwujud semangat untuk saling membantu, peduli terhadap sesama, bekerjasama dan bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan kolektif. Hal ini sesuai perintah Allah SWT dalam Surat Al Maidah Ayat 2.....*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* Tidak pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama, karena pada hakikatnya manusia itu lemah jika sendiri, tetapi menjadi kuat dengan berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan*"Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."* Dan beliau merekatkan jari-jemarinya." Rasulullah SAW juga memotivasi kita untuk hidup bermanfaat bagi orang lain karena sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. ■



KETAHANAN KELUARGA PILAR KETAHANAN NASIONAL

Keluarga, orang tua, dan generasi yang lahir darinya adalah pilar utama yang melahirkan bangsa bahkan peradaban. Maka membicarakan tema ini selalu relevan sepanjang masa, apalagi di tengah ujian pandemi covid 19 yang melanda bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Pandemi membuat kita berkaca betapa ketahanan bangsa kita sedang diuji. Dampak pandemi bukan hanya pada aspek kesehatan tapi juga pada ekonomi, sosial, politik, pendidikan, bahkan masa depan generasi bangsa. Bahkan ada yang memprediksi kita bisa kehilangan satu generasi jika pandemi ini berkepanjangan dan anak-anak terlalu lama belajar di rumah dengan segala keterbatasannya. Tentu saja kita tidak menghendaki hal itu terjadi.

Pembatasan sosial yang ditetapkan Pemerintah sebagai upaya memitigasi penularan covid 19 mengubah cara kita berinteraksi sosial, bekerja, dan belajar. Anak-

anak yang tadinya sebagian besar waktunya berada di lingkungan sekolah dan bermain harus tetap “*stay at home*” agar terjaga dari virus corona. Satu kebijakan yang tidak mengenakan, namun kita tidak punya banyak pilihan.

Namun di balik itu, kita tetap bisa memaknai secara positif yaitu semakin intens interaksi diantara orang tua dan anak-anak yang diharapkan terbentuk ikatan atau *bonding* yang semakin kuat antara anak dan orang tua. Pandemi juga semakin menyadarkan peran orang tua yang sesungguhnya dalam mendidik dan menyiapkan masa depan putra putrinya.

Keluarga adalah pilar utama ketahanan bangsa. Keluarga juga pilar pembangunan nasional. Keluarga yang kuat memberikan kontribusi pada kokohnya bangsa karena keluarga melahirkan generasi. Dari keluarga diharapkan lahir anak-anak yang memiliki pondasi intelektual, emosional, dan spiritual yang kuat; lahir generasi yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Ada sebuah ungkapan “*al umm madrasatul ‘ula*”. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Tentu bukan hanya ibu tapi juga ada peran ayah yang bersama-sama sebagai orang tua dalam membentuk anak-anak mulai dari memberi nutrisi yang sehat, menanamkan nilai yang kuat, dan menghadirkan lingkungan untuk tumbuh kembang potensi buah hati secara baik.

Kita semua pasti memiliki kesamaan pandang tentang penting dan sentralnya peran keluarga dalam kerangka pembangunan bangsa. Tapi kita juga sadar terdapat disparitas kondisi sosial ekonomi, latar pendidikan dan pengetahuan, maupun lingkungan pergaulan, yang

mempengaruhi pola asuh dan pendidikan anak-anak dalam keluarga.

Di masa pandemi kita saksikan betapa konsep pendidikan jarak jauh (PJJ), misalnya, menjadi persoalan serius bagi sebagian besar keluarga Indonesia, mulai ketidaksiapan peran, sulitnya dispilin waktu, tidak mudahnya memotivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan kita menyaksikan banyak yang tidak mampu untuk sekedar menyiapkan sarana pembelajaran di rumah karena tidak punya hp, laptop atau komputer, tidak mampu membeli pulsa dan tidak memiliki akses internet, serta alasan ekonomi lainnya. Belum lagi bagi kelompok marginal, masyarakat miskin, keluarga di pelosok dan pedalaman, kondisinya lebih sulit lagi.

Di sisi lain, kita menghadapi tantangan bonus demografi di depan mata. Proporsi demografi kita di tahun 2030-2040 akan didominasi usia produktif 16 sd 64 tahun yang diprediksi mencapai 64 persen total penduduk. Penduduk Indonesia sendiri diprediksi pada tahun itu mencapai 297 juta jiwa. Bonus demografi ini akan bernilai manfaat dan memberi efek berantai atau *multiplier effect* bagi kemajuan bangsa jika kita mampu mengelola dengan baik, tapi sebaliknya, akan menjadi masalah serius jika kita gagal mengelolanya.

Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, dari sisi karakter dan kompetensi, agar mampu menghadapi tantangan globalisasi termasuk keterbukaan pasar tenaga kerja. Dan itu semua membutuhkan peran optimal

dari keluarga, di samping sistem pendidikan, dalam mempersiapkannya.

Sayangnya, meski penyerapan tenaga kerja kita saat ini mencapai 67,5 persen dan ini tertinggi dalam dua dekade terakhir, Indonesia belum mampu menciptakan pekerjaan kelas menengah yang kompetitif. Hal ini disebabkan antara lain karena tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai atau diperlukan untuk mengambil pekerjaan baru.

Seluruh tantangan di atas membutuhkan desain dan intervensi kebijakan yang didasarkan pada konsep pemikiran yang cermat, solutif, dan komprehensif. Dan, ketika bicara kualitas generasi, kita sepakat tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Dari sana seharusnya kebijakan pembangunan nasional bermula dan ke sana juga bermuara. Maka penting sekali mengarus-utamakan ketahanan keluarga sebagai agenda pembangunan nasional. ■



MENCETAK GENERASI MASA DEPAN YANG BERKARAKTER DAN BERKEMAJUAN

Dunia berkembang begitu cepat bahkan sampai pada tingkat yang tidak terpikirkan sebelumnya dan melampaui kemampuan dan kecepatan manusia untuk beradaptasi. Apalagi saat ini, kita telah memasuki Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada *cyber-physical system* yang telah mengubah peri kehidupan masyarakat. Dalam revolusi ini kita dikenalkan istilah-istilah baru: *artificial intelligence*, *internet of things*, *3D printing*, *robot*, dan mesin-mesin cerdas yang secara besar-besaran menggantikan tenaga kerja manusia dan menjadikan aktivitas hidup semakin mudah, efektif, dan efisien.

Aktivitas sosial berkembang sedemikian rupa dampak dari kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa secara *real time* diikuti oleh masyarakat dunia dari jarak ribuan mil. Dunia menjadi

seperti sebuah desa (*global village*) dan batas-batas negara menjadi semakin kabur. Interaksi sosial melintasi batas negara dan masyarakat menjadi satu komunitas dunia yang semakin terikat dan terkait satu sama lain. Bahkan dunia hari ini ada dalam genggamannya setiap orang melalui *gatget* yang mereka miliki dan gunakan.

Fenomena tersebut membentuk model anak-anak zaman dengan karakternya sendiri—yang kemudian kita kenal dengan “generasi milenial”, generasi “z”, generashi “alpha” dan setelahnya. Generasi ini ditandai dengan kedekatan bahkan keterikatannya dengan dunia maya yang jauh lebih intens (dominan) daripada aktivitasnya di dunia nyata.

Generasi milenial terlahir ke dunia dalam kisaran tahun antara 1982 sampai 2002 dan mengalami apa yang disebut *google generation*, *net generation*, *generation Z*, *echo boomers*, dan *dumbest generation* (Absher & Amidjaya, 2008). Ciri mereka menurut Tapscott (2008) suka dengan kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan kecepatan informasi yang instan, suka belajar dan bekerja dengan lingkungan inovatif, aktif berkolaborasi dan *hyper technology*.

Perkembangan di atas diakui membawa dampak positif terutama berkat kemudahan yang disediakan oleh kemajuan teknologi informasi. Namun, di sisi yang lain menimbulkan kerentanan bagi suatu bangsa. Kerentanan yang timbul, antara lain, karena ketidakmampuan mengendalikan perubahan sehingga menggerus apa yang menjadi inti karakter dan identitas suatu bangsa.

Itulah tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan hari ini: bagaimana mempersiapkan generasi zaman now yang berpikir maju, memiliki kemampuan beradaptasi dan berkompetisi di masa depan, tapi tidak kehilangan jati diri, identitas, dan karakter.

Untuk bisa menghadirkan generasi yang berkarakter di atas menjadi tugas dan peran pendidikan. Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang memiliki kualitas karakter dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memasuki persaingan global yang menekankan penguasaan sains dan teknologi mutakhir (modern). Pendidikan di sini secara tegas kita katakan sebagai investasi SDM (*human investment*).

Pendidikan sendiri adalah hasil dari sebuah sistem dimana negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk mendesain satu sistem pendidikan yang berkualitas secara berkesinambungan. Desain yang bisa memberi arah bagi kemajuan bangsa sehingga dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dari sistem tersebut diharapkan lahir siswa didik yang kuat dalam kepribadian dan karakter, cerdas, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki kompetensi iptek yang unggul.

Konstitusi (UUD 1945) sejatinya telah memberikan arah yang tepat, jelas dan kuat bagi sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan merujuk Pasal 31 UUD 1945 adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu disebutkan, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Baik UUD 1945 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 telah memberikan alas yang kuat dan terarah tentang profil sumber daya manusia Indonesia masa kini dan masa depan, yaitu SDM yang memiliki karakter kuat sekaligus memiliki kemampuan beradaptasi dengan kemajuan dan berdaya saing (kompetitif) dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal inilah yang harus terus ditumbuhkan dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tidak semata menonjolkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi *an-sich* tapi menggabungkan dengan proses pembentukan karakter—dimana secara eksplisit karakter yang dirujuk adalah karakter sebagai insan beragama: **beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia**. Bahkan eksplisit pula ditegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak keluar dari bingkai nilai-nilai agama (dan persatuan bangsa).

Terkait pembentukan karakter, Bung Karno pernah berucap, "Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian

sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan sebagainya.” Karakter dan identitas bangsa Indonesia itu bernama Pancasila.

Pertama, Indonesia adalah bangsa yang religious (*religious state*). Apapun agamanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religious.

Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal, yang menghormati hak-hak kemanusiaan yang beradab.

Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut terdapat tenunan dan jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbeda. Ada elemen-elemen lokal, tetapi selalu ada benang merah yang menyatukan kita. Seperti itulah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika.

Keempat, di seluruh Nusantara, bangsa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia.

Empat unsur tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan cita-cita dan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, di manapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, atau lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil makmur, tentram raharja.

Dalam perkembangannya kita sadari nilai-nilai Pancasila mulai kikis atau luntur dalam praktek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama di kalangan generasi muda. Nilai-nilai beragama (religiusitas) yang menekankan etika dan moral dalam kehidupan mendapatkan ancaman dari kebebasan (tanpa batas) yang makin dominan dan eksekutif. Demikian halnya dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan kegotongroyongan menghadapi tantangan dari nilai-nilai baru seperti individualis, konsumeris, asosial, apolitik, dan seterusnya. Merebak berbagai fenomena kehidupan yang regresif dan destruktif mulai dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT, intoleransi, terorisme, radikalisme, sparatisme, perilaku koruptif, perilaku permisif, konflik sosial, kekerasan etnis.

Lunturnya sebuah ideologi bangsa tidak lepas dari kemampuan adaptasi bangsa dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Secara internal, reformasi diakui sebagai milestone bagi penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik daripada era sebelumnya. Ia juga membawa liberalisasi dalam konteks politik yang berarti kebebasan/kemerdekaan berpendapat (*freedom of speech*), tetapi pada saat yang sama reformasi juga telah membawa eksekutif kebebasan tanpa batas (*free liberalism*) yang menggerogoti nilai-nilai budaya kemasyarakatan Indonesia.

Secara eksternal, dunia berubah begitu cepat akibat globalisasi. Sayangnya, kemampuan manusia untuk berubah acapkali tidak dapat mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya terjadi invasi budaya, nilai, identitas dominan dunia yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Generasi (muda) bangsa mengalami fase transisi yang cukup rumit, di saat nilai/norma lama bangsa belum mereka tangkap lalu hadir reformasi dan

globalisasi yang menawarkan nilai/norma baru yang lebih menarik dan 'trendi'. Sayangnya, mereka belum sempat menghayati sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru. Inilah yang disebut sebagai kondisi ketidakpastian atau 'anomie' (Durkheim 1897, Merton dalam Ritzer 2007, hlm 251-257). Pun, acapkali negara belum sempat menyesuaikan nilai/norma lama dengan kekinian sehingga generasi bangsa makin enggan mengafirmasi nilai/norma tersebut. Akibatnya terjadi kerentanan dalam kepribadian generasi bangsa. Mereka bisa menjadi sangat liberal dan kosmopolit di satu sisi, dan bisa terperosok pada radikalisme di sisi yang lain.

Jika Pancasila sebagai karakter dan identitas bangsa mulai meluntur, ini pertanda bahaya bisa mengindikasi bangsa yang sedang sakit. Kondisi ini bisa mengarah pada negara gagal (*failed state*). Negara gagal di sini tidak harus secara struktural negara itu bubar atau runtuh, tapi negara gagal bisa dipandang dari segi kualitas, yakni sebagai negara yang tidak punya 'roh' karena kepribadiannya pelan-pelan tergerogoti. Bangsa kita (bisa) kehilangan arah dan kendali, merebak penyakit sosial, dekadensi moral dan akhlak generasi muda, pengabaian etika dan hukum, disintegrasi, dan turbulensi sosial ekonomi. Itu semua ciri negara gagal seperti diduga Noam Chomsky (2006).

Tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari pembangunan infrastruktur yang intens diprediksi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan jauh lebih maju. Tapi penulis khawatir Indonesia yang kita temukan bukan Indonesia seperti yang dibangun (diharapkan) para pendiri bangsa melainkan Indonesia yang kehilangan roh. Indonesia maju tapi liberal, Indonesia maju tapi tidak punya jati diri Indonesia.

Ini semua terjadi karena kita abai pada inti karakter dan identitas kita sebagai bangsa. Inilah dampak dari reformasi yang kebablasan sehingga menghasilkan kebebasan tanpa batas. Di satu pihak masyarakat dijamin bebas, tapi sebagian besarnya tidak dapat mengendalikan kebebasan sehingga menjadi kebablasan.

Pancasila tentu tidak dimaksudkan untuk imun atau steril dari pengaruh perkembangan zaman. Zaman boleh berubah tapi nilai-nilai Pancasila harus tetap relevan, tumbuh, dan berkembang sebagai karakter dan identitas (kepribadian) bangsa. Upaya untuk memasyarakatkan Pancasila harus dilakukan dengan kreatif dan atraktif agar tertanam efektif pada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada generasi milenial. Pancasila tidak harus selalu ditampilkan secara kaku tapi yang terpenting hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan.

Ambil contoh budaya orang Jepang yang menghormati senioritas (orang-orang yang lebih tua) masih tertanam kuat pada struktur perusahaan dan masyarakat Jepang hingga hari ini di tengah kemajuan yang mereka capai. Identik dengan Jepang kita sejatinya juga punya nilai-nilai yang merupakan pengamalan Pancasila yakni tradisi menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Di samping itu ada tradisi gotong royong, semangat kekeluargaan, tepo selero atau tenggang rasa, dan lain-lain. Nilai dan tradisi tersebut semestinya tetap tertanam kuat dalam kepribadian bangsa.

Generasi milenial punya keunggulan yaitu pribadi yang kreatif, percaya diri, dan selalu terhubung atau membangun kolaborasi. Keunggulan ini harus bisa dimanfaatkan semua

pihak untuk lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara yang sesuai dengan karakter mereka. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus merevitalisasi Pancasila sebagai identitas dan karakter bangsa hingga Pancasila dapat seiring sejalan dengan kemajuan zaman. Meski demikian, ada saatnya negara tetap harus tegas mengatakan bahwa nilai-nilai tertentu (negatif) tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila. Dan di situlah martabat (*dignity*) kita sebagai bangsa diuji.

Kita semua sebagai warga bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter dan berkemajuan untuk generasi kita. Jangan merusaknya dengan sikap, perkataan, kebiasaan, maupun tontonan yang tidak mendidik yang menyimpangi tujuan pendidikan nasional di atas. Karena itu, dengan tegas kita harus bersikap: “stop!” terhadap seluruh anasir yang merusak pendidikan bangsa mulai dari pornografi, pergaulan bebas, narkoba, kekerasan/radikalisme, kemalasan, budaya liberal tanpa batas, dan sebagainya. Sebaliknya, mari tumbuhkan budaya taat beragama, budaya baca, inovasi, budaya ilmiah, berintegritas, bertanggung jawab, mandiri, pantang menyerah, dan sebagainya.

Menjadi tanggung jawab negara cq pemerintah untuk menyediakan kurikulum dan infrastruktur pendidikan yang semakin merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kita memerlukan sistem pendidikan yang terstandarisasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan strategi pencapaian yang efektif untuk seluruh daerah di Indonesia. Tentu guna mencapai hal itu, variable kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan wajib diperhatikan dan ditingkatkan oleh negara. Belajar

dari negara-negara maju dalam pendidikan, komponen kesejahteraan ini penting karena secara psikologis dan kualitatif mempengaruhi profesionalisme dalam proses pengajaran. Hal ini, bukan saja terkait gaji atau penghasilan, tapi menyangkut penghargaan profesi, peningkatan pengetahuan dan wawasan, serta tersedianya ruang kreativitas dan aktualisasi diri di lembaga-lembaga pendidikan. ■



MEMBANGUN PERAN KEBANGSAAN PEREMPUAN

Indonesia adalah negara kesatuan sebutan resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia bentuk negara kesatuan dipilih oleh para pendiri bangsa untuk melindungi kondisi geografi sebagai kepulauan terpanjang di garis khatulistiwa sering disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa yang terdiri dari 34 provinsi 416, kabupaten dan 98 Kota, 7.024 Kecamatan serta 81.626 desa kelurahan. Jumlah pulau di Indonesia 17.508 pulau.

Bayangkan kita ambil sebuah perhiasan kalung terdiri dari 17.508 butir zamrud yang besar maupun kecil. Alangkah indahnya. Apalagi pulu-pulu itu semuanya sangat subur dan di bawah tanahnya juga tersimpan sumber daya minyak dan mineral. Jumlah penduduk Indonesia menduduki urutan keempat di dunia dengan total populasi sebesar 275.122.131 jiwa Berdasarkan sensus tahun 2020 perempuan 49,2% dari total sementara laki-laki 50,8%.

Menteri Bappenas dalam *Forum Trading and Development Gender Equality* bulan Mei 2019 di Fiji mengatakan bahwa perempuan Indonesia adalah aset potensial dan investasi bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan harus diperhitungkan karena telah berkontribusi di berbagai bidang termasuk di bidang politik dan pemerintahan.

Dengan adanya ketentuan aturan 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam jabatan politik membuktikan bahwa peran perempuan Indonesia tidak bisa dianggap remeh mereka mampu menyuarakan aspirasi rakyat di level kebijakan pemerintah. Sudah banyak perempuan Indonesia yang menorehkan prestasi dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

Diantara yang paling banyak disebut adalah Raden Ajeng Kartini yang setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Perjuangan Kartini untuk mengedepankan hak para perempuan sangat mengagumkan. Jangan lupa Ibu Kartini bersahabat dengan Haji Agus Salim, bahkan sempat hendak memberikan jatah beasiswanya kepada Agus Salim. Dan Agus Salim ternyata memilih untuk belajar secara otodidak dengan alasannya. Kartini juga memiliki seorang kakak lelaki RM Panji Sosrokartono yang menguasai 35 bahasa di dunia yang lulus dari Universitas Leiden dan bekerja menjadi penerjemah di lembaga internasional. Meskipun di masa penjajahan potensi SDM Indonesia sangat mengagumkan.

Ada seorang perempuan yang ditakuti penjajah Belanda ialah Cut Nyak Dien. Setelah gugurnya Tengku Umar maka Cut Nyak Dien ikut serta dalam perang dan memimpin

langsung perjuangan dalam hutan Aceh Darussalam. Tidak benar anggapan yang melihat perempuan Indonesia bersifat lemah sebab banyak pahlawan perempuan yang terbukti tegar dalam perjuangan.

Ada juga perempuan pahlawan Rahmah El Yunusiah dari Sumatera Barat yang menderikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang. Berjuang bukan hanya di jalur pendidikan tetapi juga di jalur politik, pada tahun 1932 Rasuna Said dipenjara oleh penjajah Belanda karena mobilisasi massa dan cara berpikir yang kritis selain mendirikan perguruan, Rasuna Said juga membuat majalah mingguan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Beliau juga seorang jurnalis yang berjuang untuk Indonesia dengan pena dan mesin ketik.

Kita juga punya banyak cerita tentang perjuangan para pahlawan perempuan di bidang olah raga. Ada Gressia Polly dan Apriyani Rahayu yang mempersembahkan medali emas olimpiade. Penampilan mereka menyedot perhatian dunia karena kekuatan smash mereka tidak kalah dengan kaum lelaki dan kerjasamanya dalam menjaga area lapangan dan menangkis serangan lawan. Dan masih banyak lagi perempuan hebat lainnya yang berkiprah mengharumkan negeri ini.

Mencermati peran perempuan dalam sejarah, Partai Keadilan Sejahtera menjadikan perempuan sebagai pilar yang penting dalam melayani umat, membangun bangsa dan negara. Dari tangan para perempuan kita melakukan proses kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan secara bertahap terus-menerus dan berkelanjutan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter tokoh pemimpin dan pelopor. Sudah banyak

tokoh perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan ber hikmat untuk masyarakat baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun di ranah profesional dan kemasyarakatan. Dan hal ini ke depan akan terus kita perkuat.

Ambil contoh Ustadzah Yoyoh Yusroh (almarhumah) yang getol menggolkan RUU Pornografi dan Pornoaksi hingga menjadi undang-undang dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman dekadensi moral. Ustadzah Rohana yang berjuang di bidang politik dan pendidikan, Pendiri Pesantren Daarul Qur'an. Ada pula Ustadzah Wiryaningsih, politisi pejuang Rumah Keluarga Indonesia yang melahirkan dan mendidik 10 anak hafiz dan hafizah Alquran. Masih banyak lagi perempuan PKS yang berkiprah di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan profesional.

Beberapa tokoh perempuan PKS yang berkiprah di DPR yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetyani, Anis Byarwati, Kurniasih Mufidayati, Sakinah Aljufri, Sa'adiah Uluputty, Nur Azizah Tamhid dan Nevi Zuhairina. Dan lebih banyak lagi yang menjadi anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota. Sementara yang menjadi pejabat eksekutif adalah Hj Sri Yuniarsih sebagai Bupati Berau Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kecerdasan dalam membangun warga daerah sehingga contoh keunggulan.

Perjuangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera di kancah publik tak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan namun juga mewujudkan keseimbangan dalam kebijakan pembangunan negara. Ia memerlukan andil dari perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi

seluruh rakyat terutama afirmasi terhadap kesejahteraan anak, keluarga, dan kelompok rentan. Apabila kita mengabaikan kelompok rentan ini maka akan terjadi guncangan sosial yang meruntuhkan capaian ekonomi dan stabilitas politik. Hal ini yang tak disadari oleh sebagian pemimpin yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi atau politik dan pertahanan keamanan lalu melupakan sektor kesejahteraan sosial.

Alhamdulillah PKS memiliki pusat pembelajaran dan pelatihan untuk ketahanan keluarga dengan program yang digulirkan bernama Rumah Keluarga Indonesia yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 1500 lokasi dengan jumlah penggerak puluhan ribu relawan.

Peranan kaum perempuan dalam dakwah islam, tentu tercatat dalam sejarah antara lain perjuangan sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang menopang kebutuhan ekonomi dan psikologis di masa penuh dengan tekanan. Pada awal perjuangan Rasulullah SAW diwarnai dengan serangan fisik dan psikologis bahkan boikot sosial dan ekonomi serta diusir dari kampung halamannya. Kehadiran seorang pendamping setia sangat dibutuhkan seorang pemimpin di masa genting. Sepeninggal Khadijah r.a. istri-istri Rasulullah yang lain memainkan peran yang sangat penting.

Semisal Aisyah r.a. menjadi pendidik kaum perempuan dan pewaris ilmu Rasulullah SAW, Ummu Salamah yang cerdas dan sabar, Zainab binti Khuzaimah seorang dermawan dan Ibunda bagi kaum fakir miskin. Di samping itu ada shohabiyah yang gagah berani seperti Asma binti Abu Bakar Asshidiq yang melindungi Nabi SAW saat hijrah.

Ada beberapa nama shahabiyah yang terdengar masih asing di telinga kita perlu kita pelajari bersama yaitu Arwa binti Abdul Muthalib, wafat 15 Hijriyah. Bibi Rasulullah SAW ini terpandang di masa jahiliyah dan Islam. Memiliki ide-ide yang sangat profesional dan pandai membaut syair. Fatimah binti Khais binti Khalid termasuk rombongan pertama hijrah. Di tempat kediamannya berlangsung musyawarah sahabat untuk memilih pengganti Khalifah Umar Bin Khattab r.a. Khaula binti Azwar Alasadi, keberaniannya mirip dengan Khalid bin Walid dalam peperangan membuat kumpulan syair tentang penaklukan negeri-negeri Syam. Kemudian Laila Alghifariah sering mengikuti Rasulullah SAW dalam pertempuran dan tugasnya adalah mengobati pejuang yang sakit dan terluka.

Walaupun para shahabiyat aktif dalam tugas publik bahkan terlibat di medan jihad namun mereka tidak melupakan tugas membina keluarga, karena tugas utama kaum perempuan, tentu saja dengan dukungan kaum lelaki, adalah mempersiapkan generasi yang lebih tangguh dan cerdas dalam menghadapi segala tantangan saat ini dan di masa depan. Saat ini di masa pandemi kita diberi hikmah perlunya generasi yang sehat dan kuat serta kreatif untuk melakukan terobosan.

Sejarah mengingatkan bahwa banyak perempuan-perempuan Indonesia yang sudah menorehkan tinta emas dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Untuk meneruskan perjuangan mereka perlu dimunculkan tokoh-tokoh berkualitas yang terampil dan cerdas. Para perempuan harus terus didorong untuk meningkatkan kapasitas agar mampu berkiprah secara optimal dan meneruskan estafet para pejuang perempuan terdahulu. ■



PELAJARAN PENTING PANDEMI COVID 19 BAGI DUNIA

Pandemi covid-19 telah menjadi tantangan baru bagi seluruh negara di dunia, tidak hanya dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman dalam keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi. Selain mengakibatkan banyaknya orang yang meninggal dunia, pandemi covid 19 juga telah menimbulkan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia melambat, bahkan sejumlah negara mengalami pertumbuhan minus dan diambang resesi.

Di tengah ancaman tersebut, tidak mengherankan jika seluruh negara di dunia berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan obat dan peralatan medis termasuk kebutuhan vaksin untuk melindungi warga negaranya dari wabah ini. Vaksin menjadi *game changer* untuk mengatasi covid-19. Namun pada sisi lain, perlombaan dalam

pemenuhan vaksin ini acapkali menunjukkan ketimpangan yang besar dalam hal riset, teknologi, dan kapasitas ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara maju mampu melakukan riset untuk menemukan vaksin covid-19 sedangkan negara-negara berkembang masih jauh tertinggal. Negara kaya mampu menyediakan vaksin berapapun harganya sedangkan negara miskin harus menunggu bantuan.

Selain itu, vaksin juga membuka kotak pandora dari aspek bisnis yang luar biasa. Lebih dari 16 miliar dosis vaksin dibutuhkan dunia diperkirakan lebih dari \$ 320 miliar Dollar AS setara dengan Rp 4.576 triliun biaya untuk penyediaan vaksin di seluruh dunia. Bisnis vaksin ini sangat menggiurkan maka tak heran dorongan untuk penangguhan paten atas vaksin covid-19 terus ditolak oleh negara maju yang memproduksi vaksin. Padahal, kita membutuhkan rasa kemanusiaan untuk menyelesaikan pandemi lebih dari kepentingan bisnis semata.

Empat seruan berikut ini harus menjadi perhatian negara-negara di dunia agar kita mampu memetik pelajaran berharga dari pandemi covid 19.

Pertama, pandemi covid 19 harus mendorong negara-negara dunia untuk bersatu, mengerahkan seluruh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi wabah yang mengancam umat manusia ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi bahasa universal yang mampu menyejahterakan umat manusia dan mengatasi problematika dunia termasuk dari ancaman wabah covid 19.

Kedua, pandemi covid 19 harus mendorong solidaritas negara-negara di dunia karena penularan maupun

penyembuhan penyakit ini sangat tergantung bagaimana negara-negara dunia memitigasi wabah secara kolektif dan tidak parsial hanya di negaranya. Di era globalisasi tidak mungkin suatu negara mengisolasi diri selamanya dari negara-negara lain. Oleh karena itu setiap negara harus saling membantu dan bekerjasama agar wabah dapat dikendalikan di negara masing-masing sehingga tidak molanjak dan berpotensi menyebarkan virus ke negara-negara lain.

Ketiga, pandemi covid 19 harus mampu mentransformasi struktur dan sistem global yang lebih memperhatikan kesejahteraan kolektif warga dunia sehingga bukan hanya memenuhi ambisi superioritas negara adidaya atau kepentingan subjektif tiap-tiap negara. Negara kuat harus menopang negara yang lemah. Negara maju harus membantu negara yang berkembang. Cara pandang terhadap dunia tidak bisa lagi dikapling-kapling antara Barat dan Timur, Utara dan Selatan. Tapi dunia tempat kita hidup ini adalah satu kesatuan yang saling bergantung satu dengan yang lain.

Keempat, pandemi covid 19 harus mampu mewujudkan dunia yang lebih damai, lebih humanis, dan lebih berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Pandemi ini harusnya menjauhkan negara-negara dunia dari sikap permusuhan, konflik, bahkan peperangan. Setiap nyawa umat manusia di dunia begitu berharga. Pandemi membuka mata kita betapa kematian yang begitu besar dan pengorbanan yang kita lakukan untuk menghentikannya harusnya mampu menghentikan ambisi dan nafsu untuk berperang menumpahkan darah umat manusia.

Kita semua berharap pandemi covid 19 ini segera berakhir. Kita juga berharap kerjasama negara-negara dunia semakin erat dalam mewujudkan tata dunia yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan bekerjasama dalam memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan bagi penghuninya. ■



PELAJARAN PENTING PANDEMI COVID 19 BAGI BANGSA INDONESIA

Pandemi covid 19 memukul kehidupan sebagian besar masyarakat khususnya yang terpapar dan terdampak langsung covid 19. Dan ini tidak hanya terjadi di negara kita, tapi di seluruh dunia. Maka dunia pun berubah mencari keseimbangan baru. Ilmu pengetahuan berkejaran dengan laju penyebaran virus. Aktivitas manusia pun berubah menuju kehidupan normal yang baru (*new normal*).

Korban jiwa berjatuhan. Ada anak-anak yang tiba-tiba yatim atau piatu, bahkan yatim-piatu sekaligus. Ada orang tua yang kehilangan anak, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, dan seterusnya. Ada ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian dan tidak berdaya secara ekonomi bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Semuanya membuka mata hati kita, menguatkan keimanan kita, begitu mudah Allah membalikkan kondisi

umat manusia. Dari sehat menjadi sakit. Dari mampu menjadi papa. Dari mudah menjadi sulit. Namun sebaliknya, dengan keimanan yang kuat pula, kita juga yakin bahwa Allah bisa dengan mudah menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang terpuruk, dan memudahkan yang sulit. Di sini kita benar-benar dituntut untuk mampu bermuhasabah secara benar.

Ada tiga level evaluasi kita dalam menghadapi pandemi covid 19 : 1) level individu, 2) level sosial, 3) level berbangsa dan bernegara.

Pada level individu sebagai insan beragama kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Level ini kita dapat kita sebut sebagai level spiritual. Apapun kondisi kita termasuk beratnya menghadapi pandemi ini, kuncinya syukur-sabar. Selanjutnya istighfar dan taubat. Dilanjutkan doa, zikir, dan istighosah memohon keberkahan, keselamatan, dan perlindungan Allah SWT. Dekatkan diri kepada Allah, ketuk pintu langit. Allah menyukai hamba-Nya yang meminta, mengharap, mengiba, dan hamba-nya yang senantiasa mengakui kesalahan-kesalahannya lalu berkomitmen untuk memperbaiki diri. Pandemi ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah kita mampu menyikapinya dengan benar. Menjadi manusia-manusia yang lebih baik, lebih tawadhu, lebih bersyukur, lebih taat, dan lebih mawas diri atas segala dosa, khilaf dan salah yang kita perbuat.

Pada level sosial kita menyaksikan pandemi menimbulkan problematika kesehatan masyarakat, sosial dan ekonomi, termasuk problem pendidikan, ketahanan keluarga, dan masa depan generasi. Jumlah kasus covid harian meningkat tajam dalam beberapa bulan ini—yang

oleh para epidemiolog disebut gelombang kedua yang dipicu varian delta. Indonesia menjadi negara terbesar jumlah kasus harian maupun tingkat kematian di kawasan Asean maupun Asia.

Banyak masyarakat yang terpapar dan terdampak langsung pandemi yang membutuhkan bantuan sosial ekonomi dengan anggaran yang tidak sedikit secara kumulatif. Di sisi lain, kita saksikan negara kuwalahan. Rumah sakit kuwalahan. Tenaga medis kuwalahan. Pada level ini kita memerlukan solidaritas sosial nasional. Inilah modal penting ketahanan nasional kita dalam menghadapi problematika apapun termasuk pandemi ini.

Pada level ini kita butuh untuk terus menumbuhkan dan mengokohkan solidaritas sosial nasional ini. Kita bahu membahu, gotong royong, dan bersatu padu untuk membantu rakyat yang kesulitan. Dalam konteks ini misalnya, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan berbagai program nasional, antara lain: pusat khidmat PKS, 1,5 juta paket qurban, 1 juta paket sembako, potong gaji anggota dewan, relawan tanggap bencana, satgas covid, dan lain-lain.

Kita bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial di tengah pandemi saat ini. Ada yang membantu ambulance, oksigen, APD, menyediakan makanan bagi pasien isoman, hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat. Inilah karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Terakhir pada level berbangsa dan bernegara, pandemi ini benar-benar membuka mata kita bahwa begitu banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan negara yang

perlu kita perbaiki. Sistem kesehatan nasional perlu kita perbaiki agar dapat memberikan layanan kesehatan kepada seluruh rakyat dalam kondisi sesulit apapun. Prinsipnya tidak boleh ada rakyat yang terkapar sakit bahkan tidak tertolong oleh layanan kesehatan seperti yang kita saksikan di tengah pandemi ini. Betapapun sebenarnya kita telah memiliki UU Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), tapi pada prakteknya kita masih harus terus perbaiki dan kawal realisasinya dalam kebijakan.

Sistem dan kebijakan pembangunan secara umum juga perlu mendapat perbaikan yang mendasar. Soal ekonomi, kebijakan anggaran, dominasi utang negara, kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, dan kekayaan lainnya. Pembangunan nasional semestinya bertumpu pada kemandirian, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan berdaulat atas berbagai sumber daya nasional. Hasil-hasilnya juga harus dirasakan oleh rakyat secara menyeluruh, merata, dan berkeadilan. Namun jujur kita masih punya kendala pada hal-hal elementer seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini. Sistem yang meng-adress permasalahan tersebut juga belum berjalan dan terkoneksi dengan baik, seperti sistem administrasi kependudukan, jaring pengaman sosial, data dan distribusi bantuan sosial, akses dan pemerataan pendidikan, pemberdayaan, pendampingan dan permodalan ekonomi rakyat, hingga masalah ketahanan keluarga.

Pendapatan perkapita rakyat Indonesia masih timpang. Penguasaan aset-aset kekayaan di republik ini juga menunjukkan ketimpangan yang cukup serius. Dalam laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) tahun 2019 menyatakan bahwa 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Persoalan pemerataan aset dan kekayaan nasional ini harus menjadi perhatian bersama karena inilah esensi tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dan bukan segelintir golongan.

Rakyat Indonesia bukan hanya di Jawa, maka kebijakan pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Namun hari ini kita masih mengalami realitas ketimpangan tersebut. Akses kepada rumah sakit, dokter dan tenaga medis, sekolah dan universitas, lapangan kerja, sentra usaha dan ekonomi, serta layanan publik lainnya masih lebar disparitasnya antara di kota, desa dan pelosok, antara di pulau Jawa dan luar Jawa, dan seterusnya.

Kita semua seyogyanya melihat problematika tersebut sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Ini bangsa dan negara kita. Dalam Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Allah SWA berfirman: *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dus, perubahan dan perbaikan bangsa ini ada di tangan kita. Dan kita harus optimis karena sesungguhnya kita punya semua syarat dan modal untuk menjadi bangsa besar, bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.* ■



MENGEMBALIKAN KEJAYAAN LAUT NUSANTARA

Laut adalah bagian terbesar dari Indonesia, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Laut, bahkan, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, sebagai bangsa maritim dan bahari terbesar di dunia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, sudah selayaknya kita ingin mengembalikan kejayaan laut bagi anak-cucu kita kedepan.

Bangsa kita memiliki letak paling strategis di dunia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, juga terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat, yang sering dijadikan alur transportasi, persimpangan lintas perjalanan internasional. Jalur perairan tersebut menghubungkan Indonesia dan negara sekitarnya dengan negara dari benua lain, seperti Australia, Amerika dan Eropa bahkan Afrika. Dengan posisi strategis tersebut sudah sepatutnya Indonesia menjadi negara poros maritim terpenting di dunia saat ini.

Perlu menjadi fokus perhatian kita bersama. Dengan segala potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki saat ini, ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru sebesar 3,7 persen. Kondisi nelayan kita sebagian besar merupakan nelayan tradisional, dengan perahu dan peralatan seadanya. Masih minimnya akses permodalan untuk biaya operasional melaut, membuat nelayan kita tidak berkembang. Nelayan juga masih kurang pengetahuan dan teknologi penangkapan ikan secara modern. Selain itu, masih terbatasnya penyimpanan dan pengelolaan hasil tangkap, membuat nasib nelayan kita makin terpinggirkan. Oleh sebab itu, dengan tingkat persaingan dari kapal-kapal asing yang lebih modern, perlu ada keberpihakan dan insentif dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para Nelayan.

Belum optimalnya potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki juga tercermin dari tingginya angka kemiskinan disepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan

data BPS per September 2021 angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen atau 26,50 juta jiwa. Dari angka tersebut, kemiskinan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) relatif tinggi, mencapai kurang lebih 30 persen. Begitu juga dengan angka kemiskinan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sekitar 35 persen, jauh melebihi angka kemiskinan nasional. Kondisi ini menunjukkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki belum optimal, diperburuk dengan minimnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pesisir.

Padahal sesungguhnya Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Total potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan diperoleh dari kurang lebih 11 sektor, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral (garam), pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, *coastal forestry*, sumber daya wilayah pulau pulau kecil dan sumber daya non konvensional, semuanya merupakan potensi besar yang harus kita optimalkan.

Kita berkeyakinan, jika semua potensi kelautan tersebut dimanfaatkan secara sungguh-sungguh, makan kita bisa meningkatkan kesejahteraan tidak hanya para nelayan kita, tetapi perekonomian bangsa secara umum. Pemerintah sendiri mencatat potensi sektor kelautan dan perikanan nasional akan mencapai 1,3 kali dari PDB alias 130 persen. Bahkan potensi ekonominya mencapai US\$ 1,3 triliun per tahun atau 5 kali lipat dari APBN kita saat ini. Potensi besar tersebut sudah seharusnya bisa menjadi penggerak roda perekonomian dan sumber pertumbuhan

ekonomi Indonesia kedepan. Tentunya menjadi harapan kita bersama, agar para Nelayan kita bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Sesungguhnya kita memiliki persyaratan menjadi negara maju, potensi sumber daya alam kita, mulai dari darat (bahan tambang, migas, hutan dll.), udara (udara, frekuensi dll.) dan laut (perikanan, migas, mineral dll.) sangat melimpah ruah. Dengan semangat kolaborasi yang terus kita bangun dengan seluruh *stake holder* bangsa lainnya, ingin mengembalikan kejayaan laut nusantara sebagai bangsa maritim dan bahari terbesar di dunia. Para pemimpin, elit politik, swasta, masyarakat sipil mari berpartisipasi aktif dalam membangun potensi kelautan dan perikanan nusantara dimana saja berada. Kita jadikan sebagai momentum bersama untuk berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk mengembalikan kejayaan laut nusantara. ■



MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN

Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam agraria dan maritim yang luar biasa. Negeri ini pada masanya juga pernah berdiri di atas kaki sendiri dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Namun hari-hari ini Kedaulatan Pangan di Indonesia hanya sekadar angan semata. Berbagai impor bahan pangan silih berganti membanjiri yang membuat kesejahteraan petani, peternak dan nelayan terancam.

Kita masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan mewujudkan ketahanan pangan sekalipun. Hasil studi terkait indeks keberlanjutan pangan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 60 dari 67 negara yang diukur, yang mana dengan nilai tersebut posisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara-negara Afrika seperti Ethiopia (Rank 27), Zimbabwe (31), Zambia (32).

Begitupun juga dari hasil analisis Indeks Kelaparan Global (*Global Hunger Index*) menunjukkan nilai GHI Indonesia terus mengalami penurunan bahkan tahun 2020 menyentuh angka 20.1 atau masuk dalam kategori negara dengan status kelaparan kronis. Hal ini membawa pesan bahwa banyak sekali pe er yang harus diperbaiki.

Mengapa hal ini terjadi? Mindset pengambil kebijakan dan praktek kebijakan pemerintah yang tidak/belum mendukung kedaulatan pangan. Solusinya, pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tidak lagi berorientasi pada ketahanan pangan dengan menjalankan kebijakan impor, karena hanya akan menyengsarakan petani. Mindset-nya harus diubah, tidak lagi ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan.

Konsekuensinya jika stok pangan kita berkurang, maka yang harus dilakukan bukan impor, tapi meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Caranya banyak sekali tapi butuh komitmen dan keberpihakan pada petani kita. Kalau ketahanan pangan, maka jalan keluarnya impor. Dan sudah pasti petani jadi korban lagi karena impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani.

Untuk itu pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan. Fokus pada pemberdayaan petani. Perhatikan biaya produksi pertanian kita sehingga petani bisa memiliki keuntungan. Sarana produksi, seperti pupuk dan bibit, hingga sewa lahan dan rantai distribusi, harus turut menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah.

Bagaimana mungkin masyarakat tertarik bertani kalau biaya produksi, seperti harga pupuk dan sewa lahan terus naik. Prospek pertanian tidak menarik dikembangkan karena biaya produksi naik, sementara penghasilan turun.

Ini perlu perhatian bersama dari pemerintah secara sinergis lintas sektor dan bidang termasuk dengan swasta dan pengusaha.

Tidak kalah penting kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan kapasitas petani, terutama dalam penggunaan teknologi alat mesin pertanian. Kondisi di berbagai wilayah Indonesia berbeda-beda. Diperlukan teknologi yang lebih presisi dalam meningkatkan hasil pertanian dan kepastian pada petani dan penyuluh menguasai teknologi tersebut.

Pemerintah harus konsisten dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. Hal ini tidak mudah karena tarikan kepentingan ekonomi dan investasi yang lebih menjanjikan keuntungan cepat. Hal itu nampak kuat misalnya dalam politik perundang-undangan tentang cipta kerja (UU Omnibus Cipta Kerja).

Dalam pandangan kritis kita terhadap undang-undang ini, alih-alih akan memperkuat kedaulatan pangan justru semakin membuka lebar importasi dengan mengubah beberapa UU terkait pangan khususnya yang terkait dengan pembatasan impor. Hal ini terlihat pada perubahan pasal 15, 30 dan 101 dalam UU 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani terkait hilangnya perlindungan petani melalui kewajiban Negara untuk mengendalikan impor. Bahkan menghapus sanksi bagi pelaku impor pangan yang melanggar ketentuan perundangan. Selain itu perubahan pasal 14, 15 dan 36 dalam UU Pangan semakin menegaskan mengenai rezim impor pangan di Indonesia yaitu menjadikan impor pangan sebagai salah satu sumber pangan nasional

dengan menghapus kewajiban mengutamakan sumber pangan produksi dalam negeri.

Aturan-aturan tersebut tentu layak dan sudah sepatutnya kita kritisi karena semakin menjauhkan asa untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kita semua berharap, petani kita, peternak kita dan nelayan kita harus dan wajib sejahtera. Untuk itu kedaulatan pangan harus kita rebut kembali apapun biaya yang harus diambil. Negara harus melindungi hak-hak petani sebab persoalan pangan ini adalah hidup mati suatu bangsa, namun tanpa petani yang kuat mustahil negara ini bisa mewujudkan kedaulatan pangan. ■



PROFIL PENULIS

Nama Lengkap : **Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, Lc., M.A.**

TTL : Surakarta, 17 Juli 1954

Jabatan : Ketua Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera

Keluarga :

Istri : Zaenab Alwi Basri

Anak : 5 Anak

1. Idrus Salim
2. Sarah Salim
3. 'Afaf Salim
4. Rihab Salim
5. Sumayyah Salim

Pendidikan :

- SDI Diponegoro, Solo (1962), MTs. Perguruan Alkhairaat (1969), MA Perguruan Alkhairaat (1972)
- S1 (1976), S2 (1980), S3 (1986) Bidang Syariah Univ. Islam Madinah, Arab Saudi (predikat cumlaude)

Riwayat Organisasi :

- Ketua Dewan Syariah PKS
- Wakil Ketua – Persatuan Ulama Muslim Internasional
- Ketua Dewan Mustasyar Rabithah Alawiyah (2015-2020)
- Anggota Dewan Mustasyar Rabithah Alawiyah (2020-2025)

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur – Syariah Consulting Center
- Dosen – UIN Syarif Hidayatullah
- Dosen – Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA)
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman ke-16, 11 Nov 2005 – 21 Okt 2009
- Menteri Sosial Republik Indonesia ke-26, 2009 – 2014
- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, 10 Agustus 2015 – sekarang

Media Sosial :

- Facebook : Salim Segaf Al Jufri
- Instagram : @salimsegafaljufri
- Twitter : @salimsegafaljufri

Cintai seluruh penduduk negeri ini apapun sukunya, apapun agamanya, apapun partai dan golongannya. Cari titik temu, bangun kolaborasi. Saya yakin kalau kita mencintai seluruh penduduk negeri ini tidak lama lagi kita akan bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

- Dr. Salim -